

Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2009

Pemulihan dan langkah-langkah selanjutnya
melalui pekerjaan yang layak

Copyright © International Labour Organization 2009
Cetakan Pertama 2009

Publikasi-publikasi International Labour Office memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: pubdroit@ilo.org. International Labour Office menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] atau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

ISBN 978-92-2-022753-4 (print)
ISBN 978-92-2-022754-1 (web pdf)

ILO

Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2009: pemulihan dan langkah-langkah selanjutnya melalui pekerjaan yang layak/Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO, 2009
vi, 59 p

Juga tersedia dalam bahasa Inggris: Labour and social trends in Indonesia 2009: recovery and beyond through decent work/International Labour Office – Jakarta: ILO, 2009
vi, 54 p.

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggungjawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggungjawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari International Labour Office atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org
Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns

Dicetak di Indonesia

Prakata

Edisi kedua laporan *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia (Labour dan Social Trend in Indonesia)* ini menganalisa dampak krisis keuangan global, ekonomi dan lapangan kerja terhadap pasar tenaga kerja Indonesia dan menyoroti beberapa tantangan pada kebijakan utama yang timbul akibat krisis. Dalam banyak hal, Indonesia mampu menghadapi krisis tersebut relatif lebih baik daripada banyak negara lain di Asia dan di dunia. Walaupun demikian, Indonesia tidak luput dari krisis tersebut. Hal ini terlihat, misalnya, dari membengkaknya lapangan kerja informal dengan pendapatan dan produktivitas rendah, dengan sedikit atau tanpa perlindungan sosial, dan terbatasnya saluran untuk mendapatkan perwakilan dan menyuarakan kepentingan. Di Indonesia, manifestasi dampak krisis tersebut bukanlah berupa penurunan kuantitas lapangan kerja melainkan memburuknya kualitas lapangan kerja.

Pada saat yang sama, krisis tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan yang diperlukan, tidak hanya sebagai tanggapan langsung terhadap krisis, tetapi juga bagi kepentingan kebutuhan-kebutuhan jangka panjang lainnya. Disusun berdasarkan laporan tahun lalu, laporan ini juga mengkaji beberapa peluang dan tantangan utama dalam pasar tenaga kerja Indonesia bahkan sebelum krisis. Analisa seperti itu ditujukan untuk menginformasikan perkembangan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah berikutnya (2010–2014) dan peta kegiatan bagi pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium.

Laporan ini disusun oleh Kazutoshi Chatani dan Kee Beom Kim, dan sebagian disusun berdasarkan kertas kerja yang merupakan buah pikiran bersama salah satu pengarang laporan ini.¹ Laporan ini banyak mendapat bantuan teknis dan komentar berharga yang diberikan oleh rekan-rekan dari Kantor ILO Jakarta, Unit Analisa Ekonomi dan Sosial Wilayah dari Kantor ILO Wilayah Asia dan Pasifik, serta Kantor Pusat ILO di Jenewa.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan sumbangsih dalam menginformasikan jalur pemulihan dan pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruhnya, berdasarkan pekerjaan yang layak, di Indonesia.

Alan Boulton
Direktur
Kantor ILO Jakarta

¹ P. Huynh, S. Kapsos, K. B. Kim dan G. Sziraczki : *"Impacts of the Current Global Economic Crisis on Asia's Labour market"*, Kertas Kerja Institut Bank Pembangunan Asia (ADB), akan segera dipublikasikan).

Daftar Singkatan dan Istilah

ADB	<i>Asian Development Bank</i> (Bank Pembangunan Asia)
Apindo	Asosiasi Pengusaha Indonesia (<i>The Employers' Association of Indonesia</i>)
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara)
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (<i>National Development Planning Agency</i>)
BI	Bank Indonesia (<i>The Indonesian Central Bank</i>)
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (<i>National Agency for the Placement dan Protection of Indonesian Overseas Workers</i>)
BOS	Bantuan Operasional Sekolah (<i>School Operational Assistance Program</i>)
BPS	Biro Pusat Statistik (<i>National Statistic Agency</i>)
EB	<i>Equipment-based</i> (Berbasis Peralatan)
EU	<i>European Union</i> (Uni Eropa)
PDB/ PDB	<i>Gross Domestic Product</i> (Produk Domestik Bruto)
ILO	<i>International Labour Organization</i> (Organisasi Perburuhan Internasional)
IMF	<i>International Monetary Fund</i> (Dana Moneter Internasional)
Jamsostek	Jaminan Sosial Tenaga Kerja (<i>National Sosial Insurance Fund</i>)
KADIN	Kamar Dagang dan Industri Indonesia (<i>The Indonesian Chambers of Commerce dan Industry</i>)
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i> (Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja)
LFS	<i>Labour Force Survey</i> (Survei Angkatan Kerja)
LRB	<i>Local resumber-based</i> (Berbasis sumber daya lokal)
MDG	<i>Milenium Development Goal</i> (Sasaran Pembangunan Milenium)
OAW	<i>Own-account worker</i> (pekerja yang bekerja sendiri)
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> (Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi)
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (<i>National Program for Community Empowerment</i>)
PPP	<i>Purchasing power parity</i> (Kesetaraan daya beli)
Rp.	Rupiah
SMA	Sekolah Menengah Atas (<i>Senior High School</i>)
SMEs (UKM)	<i>Small dan medium enterprises</i> (Usaha Kecil Menengah)
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan (<i>Vocational High School</i>)
SMP	Sekolah Menengah Pertama (<i>Junior High School</i>)
UN (PBB)	<i>United Nations</i> (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i> ; (Organisasi Pendidikan, Ilmiah dan Budaya PBB)

Catatan: Dalam laporan ini digunakan nilai tukar sebagai berikut:
1 dolar Amerika Serikat (USD) = Rp. 10.000

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Singkatan dan Istilah	iv
Garis besar	1
1. Tren dalam pasar tenaga kerja	5
1.1 Tren ekonomi	5
1.2 Dampak krisis global terhadap pasar tenaga kerja	7
1.3 Kelompok-kelompok rentan pengangguran	12
1.4 Pemulihan yang tersendat dalam pasar tenaga kerja	16
1.5 Respons kebijakan	20
1.6 Implikasi kebijakan	23
2. Melampaui krisis: Penguatan pondasi bagi pengembangan padat karya	29
2.1 Batas minimum perlindungan sosial	29
2.2 Pergeseran struktural dalam pekerjaan	35
2.3 Memperbaiki kualitas angkatan kerja	40
2.4 Memastikan kesetaraan gender	42
2.5 Menghijaukan perekonomian bagi pembangunan berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja	46
Lampiran I Pembagian lapangan kerja menurut BPS dalam perekonomian formal dan informal	48
Lampiran II Lampiran statistik	49
Daftar Tabel	
1.1 Prakiraan pertumbuhan ekonomi (saat tercatat tanggal 25 Mei 2009)	5
1.2 Persentase Distribusi Produk Domestik Bruto pada Harga Pasar Saat Ini	6
1.3 Tren dalam status pekerjaan, 2008–2009	9
1.4 Pekerjaan menurut sektor dan gender, 1997–1998	19
1.5 Komponen paket stimulus	20
2.1 Persentase pekerjaan informal menurut gender	30
2.2 Distribusi penduduk miskin yang bekerja menurut sektor, wilayah geografi dan gender	34
2.3 Angka pertumbuhan dan andil dalam PDB menurut sektor	36
2.4 Indikator kunci pendidikan	41
2.5 Persentase angkatan kerja menurut kelompok umur dan capaian pendidikan	43

2.6	Angka partisipasi angkatan kerja	43
2.7	Upah perempuan sebagai persentase upah laki-laki menurut pekerjaan utama	44
2.8	Sasaran Pembangunan Milenium, Target 1b	45

Daftar Gambar

1.1	Inflasi dan suku bunga	6
1.2	Angka pengangguran, 2005–2009	9
1.3	Pekerjaan menurut status, 1997–2007	17
1.4	Output per tenaga kerja (1990 USD), Thailand dan Indonesia, 1993–2003	18
2.1	Persentase lapangan kerja menurut status dalam pekerjaan	31
2.2	Insiden penduduk miskin bekerja menurut status kerja	34
2.3	Rasio pekerjaan berbanding penduduk	35
2.4	Perubahan dalam persentase total pekerjaan	37
2.5	Output dan pertumbuhan lapangan kerja	38
2.6	Upah nominal per jam menurut capaian pendidikan	41
2.7	Efisiensi penggunaan energi	47

Daftar Kotak Bernaskah

1.1	Dampak krisis terhadap tenaga kerja informal: kasus-kasus dari Jakarta	10
1.2	Investasi bagi pemulihan: tenaga kerja dan produktivitas	11
1.3	TKI	13
1.4	Kisah manusia: TKI yang kembali	14
1.5	Respons pasar tenaga kerja semasa krisis keuangan Asia	18
1.6	Pendekatan padat karya terhadap pembangunan infrastruktur	21
1.7	Pakta Pekerjaan Global	26
2.1	Jaminan sosial yang fleksibel (<i>flexicurity</i>)	32
2.2	Perlindungan sosial di Indonesia: Sekilas pintas	33
2.3	Penduduk miskin bekerja di Indonesia	34
2.4	Pendekatan sektoral terhadap pekerjaan	38
2.5	Sasaran Pembangunan Milenium, Target 1b	45



Tinjauan

Bagian pertama laporan ini mengkaji tren-tren kunci perekonomian, dampak krisis ekonomi global saat ini terhadap pasar tenaga kerja dan terhadap kelompok-kelompok rentan, kemungkinan tertundanya pemulihan pasar tenaga kerja dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap krisis beserta implikasinya.

Perekonomian Indonesia terus tumbuh sekalipun krisis, mencapai 6,1 persen pada tahun 2008. Perekonomian tertolong antara lain oleh penguatan pengelolaan perekonomian makro dan pengawasan sektor keuangan; besarnya porsi konsumsi rumah tangga dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dibanding ekspor; dan lonjakan terhadap konsumsi dalam negeri berkat pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2009.

Meskipun mengalami perlambatan pada tahun 2009, pertumbuhan bagaimanapun juga diharapkan mencapai 3 hingga 5 persen. Akan tetapi, perluasan yang lamban ini mungkin tidak cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang baru memasuki angkatan kerja.

Dampak terparah krisis terhadap Indonesia terlihat dari jatuhnya ekspor, dengan ekspor migas turun sebesar 55,4 persen dan barang hasil industri pengolahan sebesar 26,9 persen. Meskipun investasi terus berlanjut, ketersediaan kredit bagi usaha kecil menengah (UKM) tetap terbatas karena sentimen konservatif di sektor peminjaman. Mengingat pentingnya peran UKM dalam pasar tenaga kerja, ini dapat menghalangi kebangkitan kembali perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi mendorong anjloknya secara tajam pertumbuhan lapangan kerja berupah, yang cuma tumbuh 1,4 persen antara Februari 2008 dan Februari 2009, dibandingkan 6.1 persen dalam periode sebelumnya. Krisis global juga mengakibatkan hilangnya pekerjaan di mana-mana, dan yang paling berat terkena dampak krisis adalah tenaga kerja subkontrak, tenaga kerja lepas dan tenaga kerja temporer dalam industri-industri berorientasi ekspor. Akan tetapi, tingkat pengangguran yang cenderung menurun menyiratkan banyaknya tenaga kerja ter-PHK yang telah terserap masuk ke pekerjaan-pekerjaan lainnya, termasuk dalam

perekonomian informal, yang mengalami perluasan yang cukup mencolok, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan lapangan kerja dalam perekonomian informal ini merupakan dampak krisis yang paling besar dalam pasar tenaga kerja Indonesia.

Krisis membuat banyak tenaga kerja di pasar tenaga kerja kian rawan pengangguran. Mengingat besarnya jumlah penduduk yang terkumpul di ambang garis kemiskinan, dampak krisis terhadap pendapatan, sekalipun kecil, sudah cukup untuk mendorong rumah tangga jatuh ke jurang kemiskinan, memaksa mereka memangkas investasi-investasi jangka panjang seperti pendidikan. Tenaga kerja migran yang saat ini bekerja di luar negeri juga semakin rawan terkena pemutusan hubungan kerja dan pemulangan karena acap kali, merekalah yang paling mudah dikorbankan pada saat krisis. Beberapa negara tujuan telah mengurangi kuota yang mereka tetapkan bagi tenaga kerja asing, sedangkan banyak dari tenaga kerja migran yang sudah bekerja di luar negeri terkena pemutusan hubungan kerja. Lapangan kerja tenaga kerja muda juga kemungkinan sudah parah terkena krisis. Perempuan, yang sudah berada dalam kedudukan yang tidak diuntungkan dalam pasar tenaga kerja, dalam beberapa hal mendapat tekanan yang semakin berat untuk menanggung beban ganda mengurus keluarga sekaligus bekerja mencari nafkah sebagai kompensasi berkurangnya upah kaum laki-laki dan meningkatnya inflasi.

Kendati yang paling parah terkena dampaknya adalah pasar-pasar tenaga kerja perkotaan, hilangnya pekerjaan juga telah mendorong terjadinya pembalikan perpindahan penduduk, kali ini dari kota ke desa, dan banyak dari mereka yang kembali ke desa kemungkinan akan masuk dalam perekonomian informal.

Resesi global sedang menunjukkan tanda-tanda awal akan pulih kembali. Akan tetapi, konsekuensinya bagi pasar tenaga kerja Indonesia mungkin akan berlarut-larut; setelah krisis keuangan Asia tahun 1997-98, diperlukan waktu beberapa tahun bagi indikator-indikator seperti pengangguran, produktivitas, kemiskinan dan jumlah tenaga kerja rawan pengangguran untuk kembali ke tingkat sebelum krisis.

Pemerintah Indonesia telah menanggapi dengan cepat dan tandas dengan paket stimulus senilai USD 7,3 milyar yang ditujukan untuk mendongkrak permintaan agregat. Akan tetapi, bagian terbesar paket stimulus ini berbentuk rabat [atau pengembalian] pajak, yang, mengingat besarnya perekonomian informal Indonesia, mungkin terbatas jangkauannya. Pemerintah juga telah melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur padat karya, pengentasan kemiskinan dan dalam program-program untuk memperbaiki keterampilan kerja dan daya saing, begitu pula halnya dengan upaya-upaya untuk perekonomian ramah lingkungan.

Tren-tren yang garis besarnya dipaparkan di atas menyoroiti sejumlah implikasi kebijakan, termasuk kebutuhan untuk menempatkan pekerjaan yang layak dan produktif pada pusat krisis; kebutuhan mendesak akan

asuransi pengangguran, khususnya bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan skema bantuan sosial bagi penduduk miskin; dan kebutuhan akan dialog sosial di antara mitra tripartit dalam merancang kebijakan untuk mengatasi krisis. Krisis tersebut juga telah menyoroti pentingnya informasi dan statistik pasar tenaga kerja dalam mendeteksi tanda-tanda awal perubahan dan menginformasikan respons kebijakan yang tepat.

Bagian kedua laporan ini mengulas lebih dari sebatas krisis untuk mengkaji bagaimana pondasi bagi pembangunan yang kaya lapangan kerja (padat karya) dapat dikuatkan dengan menetapkan suatu batas minimum perlindungan sosial, melakukan penilaian terhadap pergeseran-pergeseran struktural yang telah berlangsung dalam lapangan dan hubungan kerja, memperbaiki kualitas angkatan kerja, memastikan kesetaraan gender dan memastikan agar penciptaan lapangan kerja dapat diwujudkan seiring dengan pembangunan berkelanjutan.

Krisis tersebut telah menyoroti kebutuhan akan suatu batas minimum perlindungan sosial yang mencakup dibukakannya jalan dan peluang yang lebih leluasa untuk mendapatkan pekerjaan; perawatan dasar kesehatan; perlindungan dan pendidikan bagi anak, penduduk lanjut usia dan penyandang cacat; serta bantuan sosial bagi penduduk miskin, penganggur dan mereka yang bekerja mencari nafkah dalam perekonomian informal. Keberadaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Jamsosnas) tahun 2004 sudah menunjukkan adanya kemajuan. Akan tetapi, pelaksanaan UU ini masih ditunggu.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat antara tahun 2004 dan tahun 2008 memungkinkan pertumbuhan lapangan kerja melampaui pertumbuhan angkatan kerja. Dalam kurun waktu yang sama juga terjadi penurunan yang cukup tajam dalam pengangguran di kalangan tenaga kerja usia muda, sebagian akibat meningkatnya jumlah tenaga kerja usia muda yang mendaftar untuk mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Perluasan ekonomi terutama didukung oleh pertumbuhan sektor jasa yang dewasa ini menyerap mayoritas tenaga kerja penduduk Indonesia.

Pergeseran ke produktivitas, kegiatan nilai tambah ini — yang dapat mendorong pengurangan kemiskinan dan taraf kehidupan yang lebih tinggi — menyoroti adanya kebutuhan akan investasi di sektor pertanian guna mendongkrak produktivitas di sektor ini juga. Ini pada gilirannya akan mendorong investasi dalam industri dengan potensi pertumbuhan yang tinggi untuk menyerap kelebihan tenaga kerja sektor pertanian, dan juga akan mendorong investasi dalam pengembangan pelatihan dan keterampilan untuk memfasilitasi mobilitas tenaga kerja lintas sektor.

Pendidikan dan pelatihan memainkan peran penting dalam mempersiapkan angkatan kerja untuk secara efektif melakukan penyesuaian terhadap pergeseran struktural, teknologi yang senantiasa berubah dan

kondisi perekonomian yang rawan perubahan. Meskipun angka partisipasi murni pendidikan dasar saat ini melebihi 95 persen, pada pendidikan menengah angkanya hanya 59 persen dan hanya 6,5 persen yang berhasil masuk pendidikan tinggi. Melonjaknya jumlah siswa yang kembali ke bangku sekolah dapat memberikan insentif untuk tetap bersekolah: rasio upah antara tenaga kerja berpendidikan dasar dan tenaga kerja dengan gelar pendidikan adalah 1 berbanding 4,4 pada tahun 2008. Akan tetapi, kualitas pendidikan masih merupakan persoalan utama. Kerja sama yang lebih baik antara pemerintah, mitra sosial, lembaga pendidikan dan penyelenggara pelatihan akan memastikan pemadanan yang lebih baik antara keterampilan tenaga kerja dan pekerjaan.

Kemajuan yang signifikan telah didapat dalam lima tahun terakhir ini menuju kesetaraan gender dari segi partisipasi angkatan kerja, pekerjaan dan upah. Lapangan kerja perempuan tumbuh sebesar 16,6 persen antara 2004 dan 2008, didukung oleh, antara lain, pertumbuhan di sektor jasa dan kemajuan dalam tingkat pendidikan yang diraih perempuan. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan menciut antara tahun 2004 dan tahun 2008 di sebagian besar sektor tetapi melebar di sektor-sektor lainnya (di kalangan profesional, tenaga kerja teknis dan tenaga terkait lainnya). Meskipun perempuan dengan pekerjaan administrasi dan manajerial dewasa ini pada kenyataannya berpenghasilan lebih tinggi daripada laki-laki dengan pekerjaan yang sama, perempuan masih kurang terwakili di tingkat manajerial. Akan tetapi, dukungan yang berlanjut masih dibutuhkan guna memastikan kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, pekerjaan di pasar tenaga kerja dan tunjangan sebagaimana yang didapat laki-laki.

Dalam jangka panjang, keberlanjutan pembangunan Indonesia akan tergantung pada kemampuan Indonesia melindungi keanekaragaman lingkungan hidupnya dan secara efektif mengatasi tantangan perubahan iklim. Masih terdapat ruang lingkup yang luas bagi perbaikan efisiensi penggunaan energi. Ini bukan hanya bagi kepentingan konservasi sumber daya saja tetapi juga untuk mengurangi kerawanan komoditas terhadap ketidakstabilan harga dan memberikan kesempatan menciptakan pekerjaan “hijau” yang berwawasan lingkungan. Akan tetapi, untuk mencapai perekonomian yang ramah lingkungan, dibutuhkan investasi dalam pengembangan keterampilan dan teknologi baru, serta dialog dan aksi tripartit.

Tren dalam pasar tenaga kerja

1.1 Tren ekonomi

Dalam krisis keuangan global, ekonomi dan pekerjaan, Indonesia berhasil terhindar dari resesi dan kekacauan seperti yang terjadi satu dasawarsa lalu dalam krisis keuangan Asia. Perekonomian Indonesia tumbuh 6,1 persen di tahun 2008, dan terus tumbuh di semester pertama tahun 2009, meskipun jauh lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam triwulan pertama tahun 2009, perekonomian tumbuh 4,4 persen dan melambat menjadi 4,0 persen dalam kuartal kedua tahun ini. Perekonomian diperkirakan tumbuh antara 3 dan 5 persen di tahun 2009 (Tabel 1.1). Bertolak belakang dengan pengalaman negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara lainnya selama krisis, perekonomian Indonesia terus tumbuh di seluruh triwulan terakhir. Meskipun demikian, masih harus dilihat apakah laju pertumbuhan yang lamban ini cukup memadai untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang baru memasuki angkatan kerja.

Perekonomian tetap tumbuh tetapi jauh lebih lambat

Tabel 1.1:
Prakiraan pertumbuhan ekonomi (sebagaimana tercatat pada tanggal 25 Mei 2009)

	2009	2010
ADB	3,6	5,0
Bank Indonesia	4,0	4,0–5,0
Economist Intelligence Unit	2,4	3,2
Goldman Sachs	3,5	4,5
Pemerintah Indonesia	4,0–4,5	5,0
IMF	2,5	3,5

Sumber: Masing-masing organisasi

Berbagai faktor ikut melindungi perekonomian Indonesia dari ketidakstabilan lingkungan global, termasuk pengelolaan kondisi ekonomi makro secara berhati-hati oleh pemerintah dan penguatan pengawasan sektor keuangan. Faktor lainnya adalah hakikat atau sifat dasar perekonomian Indonesia yang relatif “tertutup”. Ekspor mewakili sekitar 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) – angka ini termasuk rendah dibanding di banyak

Hakikat perekonomian yang relatif “tertutup” melindungi Indonesia

perekonomian lainnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. Dengan penduduk lebih dari 225 juta jiwa, konsumsi rumah tangga, di sisi lain, mencakup sekitar 60 persen PDB (lihat tabel 1.2).

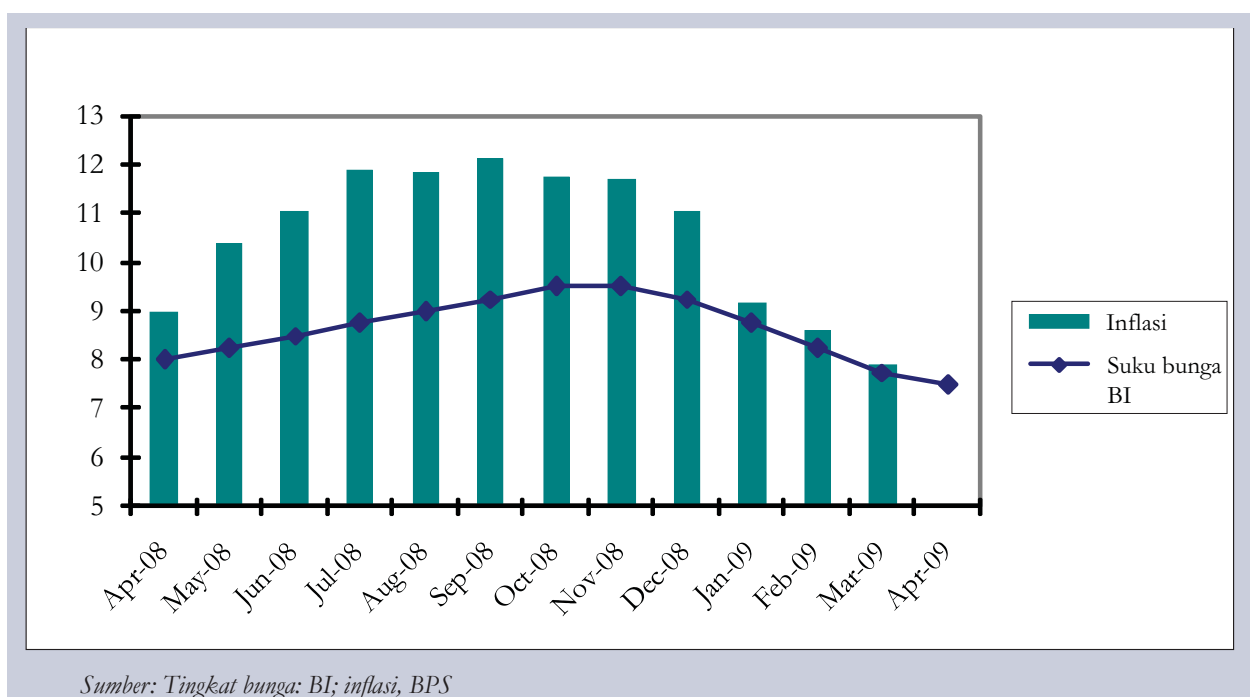
Tabel 1.2:
Persentase Distribusi PDB pada Harga Pasar Saat Ini
(persen)

Jenis pengeluaran / tahun	2000	2004	2008
Pengeluaran konsumsi swasta	61,7	66,8	61,0
Pengeluaran konsumsi pemerintah secara umum	6,5	8,3	8,4
Formasi modal tetap bruto dalam negeri	19,9	22,4	27,7
Perubahan dalam persediaan	2,4	1,6	0,1
Kesenjangan statistik*	-0,9	-3,8	1,6
Ekspor barang dan jasa	41,0	32,2	29,8
Berkurangnya impor barang dan jasa	30,5	27,5	28,6

* Perbedaan antara PDB menurut industri dan PDB menurut pengeluaran
Sumber: BPS

Pada kenyataannya, meskipun sentimen konsumen di negara-negara berkembang memburuk selama krisis global, kepercayaan konsumen di Indonesia menunjukkan sedikit tanda-tanda perbaikan dalam triwulan pertama tahun 2009 sehubungan dengan menurunnya inflasi (Gambar 1.1) dan harapan-harapan akan lebih tingginya pendapatan rumah tangga untuk tahun yang bersangkutan. Selain itu, kampanye politik pemilu legislatif yang berlangsung di bulan April 2009 dan pemilu presiden di bulan Juli 2009 ikut mendongkrak konsumsi dalam negeri.

Gambar 1.1:
Inflasi dan suku bunga
(Indeks Harga Konsumen dan suku bunga Bank Indonesia selama setahun,
dari April 2008 s/d April 2009)



Salah satu mekanisme kunci penularan krisis global saat ini ke Indonesia adalah ekspor yang berjatuh. Ekspor turun 28,9 persen dalam semester pertama tahun 2009 dibandingkan semester pertama tahun 2008. Penurunan terbesar terjadi dalam ekspor migas (turun 55,4 persen) selama periode ini, ekspor barang hasil industri pengolahan juga turun 26,9 persen. Ekspor peralatan elektronik, misalnya, turun 30,9 persen dalam semester pertama tahun 2009 dibandingkan periode yang sama di tahun 2008, sementara kendaraan 57,0 persen dan besi baja 61,8 persen.

*Sektor ekspor
berjatuh*

Investasi (formasi modal tetap bruto dalam negeri) berhasil kukuh bertahan antara tahun 2000 dan tahun 2008 dan meningkatkan andil kontribusinya terhadap PDB. Investasi juga berkembang cukup bagus pada tahun 2009, tumbuh 6,5 persen dalam triwulan kedua dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, usaha kecil dan menengah, yang memainkan peran penting dalam perekonomian dan pasar tenaga kerja, terkena imbas negatif dan pembatasan kredit. Dengan 70 persen pembiayaan komersial bersandar pada pinjaman bank, ketersediaan kredit adalah vital bagi kelangsungan dan pertumbuhan UKM.² Meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan menjadi 7,25 persen dari puncaknya 9,5 persen di bulan Oktober 2008 (Gambar 1.1) dalam usaha mengurangi biaya modal guna mendukung dunia usaha, rata-rata suku bunga pinjaman bank masih tetap setinggi 14,5 persen di akhir bulan Maret.³ Di samping itu, bank bersikap sangat konservatif dalam menyalurkan kredit kepada UKM karena dianggap berisiko tinggi menjadi kredit macet di tengah-tengah lingkungan usaha yang tidak menunjang.⁴ Meskipun Bank Indonesia telah melonggarkan kriteria persetujuan pinjaman guna memicu kredit, tetap minimnya kredit yang tersedia bagi UKM dapat menghambat pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan penyerapan tenaga kerja.⁵

*UKM ikut terkena
imbas*

1.2 Dampak krisis global terhadap pasar tenaga kerja

Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi tercermin dalam pasar tenaga kerja dalam berbagai cara. Cara pertama adalah melalui penurunan tajam tingkat pertumbuhan lapangan kerja berupah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lapangan kerja berupah tumbuh 1,4 persen antara Februari 2008 dan Februari 2009, dibandingkan 6,1 persen dalam periode sebelumnya (Februari 2007 hingga 2008). Merefleksikan fakta bahwa menurunnya ekspor merupakan salah satu mekanisme kunci transmisi krisis di Indonesia, lapangan kerja di sektor-sektor perdagangan hanya tumbuh 1,1 persen antara Februari 2008 dan Februari 2009. Sebagai perbandingan,

*Lapangan kerja
tumbuh tetapi
laju pertumbuhan
lapangan kerja
berupah turun tajam*

² The Jakarta Globe: "Banks' stubborn rate freeze will stall growth: BI", 13 Mei 2009.

³ ibid.

⁴ Lihat Bank Indonesia: *Kajian stabilitas keuangan*, No.12, Maret 2009.

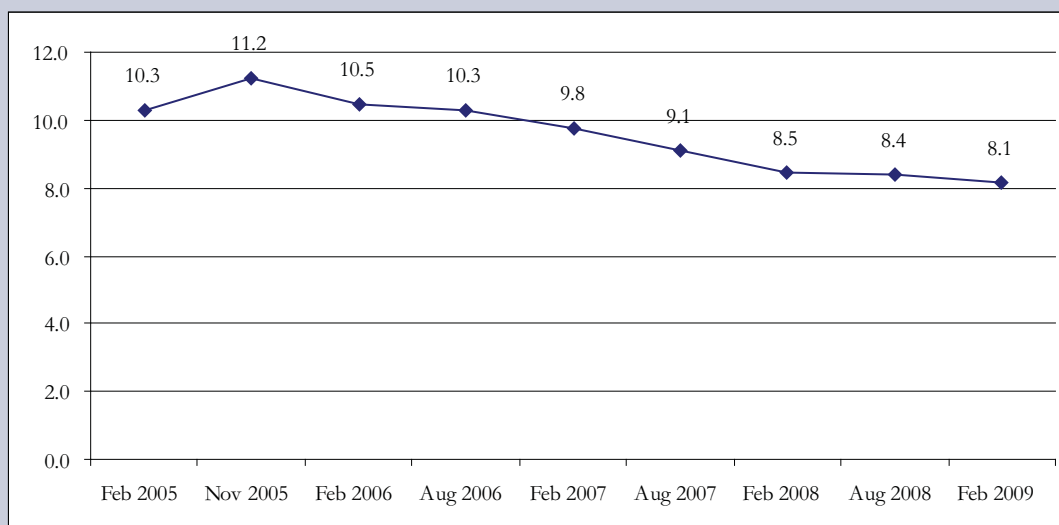
⁵ The Jakarta Post: "BI eases ruling to boost lending", 02 Februari 2009.

pekerjaan di sektor-sektor non-perdagangan tumbuh 4,0 persen. Mengingat perekonomian masih tumbuh sebesar 5,2 persen dalam triwulan terakhir tahun 2008 dan sebesar 4,4 persen dalam triwulan pertama tahun 2009 ketika survei angkatan kerja dilakukan dan kemudian menurun pertumbuhannya ke 4,0 persen dalam triwulan kedua tahun 2009, pertumbuhan lapangan kerja berupa dan/atau pertumbuhan lapangan kerja di sektor perdagangan dapat terus mengalami penurunan atau bahkan mengerut.

Hilangnya lapangan kerja terutama bagi tenaga kerja subkontrak tetapi angka pengangguran turun

Cara kedua krisis global memanifestasikan dirinya dalam pasar tenaga kerja Indonesia adalah melalui hilangnya pekerjaan. Menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, telah terjadi pengurangan lapangan kerja sebanyak lebih dari 51.000 sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan terjadinya lebih dari 237.000 PHK antara bulan Oktober 2008 dan bulan Maret 2009, 100.000 di antaranya terjadi di sektor tekstil dan garmen; 50.000 di perkebunan kelapa sawit; 40.000 di industri otomotif dan suku cadang; 30.000 di sektor konstruksi; dan 14.000 di sektor alas kaki. Tenaga kerja subkontrak, lepas dan temporer dalam industri-industri berorientasi ekspor adalah yang pertama menjadi korban pemangkasan pekerjaan karena mem-PHK-kan mereka sering kali lebih mudah daripada mem-PHK-kan staf permanen dan biayanya pun lebih kecil. Menurut Apindo, 90 hingga 95 persen tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan adalah tenaga kerja lepas atau tenaga kerja subkontrak.⁶ Meskipun demikian, sekalipun kehilangan pekerjaan, banyak dari pekerja-pekerja ter-PHK ini tampaknya telah terserap ke dalam pekerjaan-pekerjaan lain karena angka pengangguran terus menurun, jatuh ke angka 8,1 persen di bulan Februari 2009 dari 8,4 persen di bulan Agustus 2008 (Gambar 1.2).

Gambar 1.2:
Angka pengangguran, 2005–2009 (persentase)



Sumber: BPS

6 The Jakarta Post: "Total workers laid off reach over 200,000: Apindo" 12 Maret 2009.

Sementara angka pengangguran menurun di bulan Februari 2009, lapangan kerja dalam perekonomian informal mengalami pertumbuhan, membalik kemajuan berharga yang telah diperoleh dalam tahun-tahun belakangan ini. Ini merupakan dampak ketiga dan yang paling menonjol dari krisis terhadap pasar tenaga kerja Indonesia. Jumlah pekerja lepas, misalnya, naik sebesar 5,2% antara Februari 2008 dan Februari 2009, jumlah pekerja tidak dibayar naik 4,0 persen dan jumlah pekerja yang bekerja sendiri naik 3,6% (Tabel 1.3). Bandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja berupah sebesar 1,4% dalam kurun waktu yang sama dan pertumbuhan jumlah pengusaha sebesar 0,1 persen.

Yang lebih menonjol adalah meningkatnya lapangan kerja informal

Tabel 1.3:
Tren status pekerjaan, 2008–2009

	Feb. 2008 (juta)	Feb. 2009 (juta)	% perubahan
Karyawan	28,52	28,91	1,4
Pengusaha	24,58	24,61	0,1
dengan tenaga kerja permanen	2,98	2,97	-0,3
dengan tenaga kerja temporer	21,60	21,64	0,2
Tenaga yang bekerja sendiri	20,08	20,81	3,6
Tenaga kerja lepas	10,93	11,50	5,2
Pertanian	6,13	6,35	3,6
Non pertanian	4,80	5,15	7,3
Tenaga kerja tidak dibayar	17,94	18,66	4,0
Total	102,05	104,49	2,4
<i>Sumber: BPS</i>			

Turunnya pengangguran seiring dengan naiknya lapangan kerja informal yang kelihatannya seperti paradoks ini tidaklah mengherankan. Dalam situasi tingginya tingkat kemiskinan dan jaring pengaman sosial yang tidak mencukupi, bagi para tenaga kerja yang tersisih dari pekerjaan berupah atau pekerjaan lainnya sering kali hanya tersisakan segelintir alternatif selain pindah ke produktivitas yang lebih rendah dan kegiatan ekonomi informal.

Kotak 1.1

Dampak krisis terhadap tenaga kerja informal: kasus dari Jakarta

Seorang pekerja laki-laki berusia 25 tahun berpendidikan SMA adalah salah satu dari 3.000 karyawan korban PHK perusahaan Yunani di bulan September 2008. Ia kehilangan penghasilan tetap, jaminan sosial (*Jamsostek*), upah lembur dan tunjangan hari raya. Dengan uang pesangonnya yang kecil, ia pindah ke Jakarta dan memulai usahanya sendiri berjualan makanan di jalan untuk menghidupi ayahnya, istrinya dan anaknya yang berusia 4 tahun. Ia bekerja 10 jam sehari tujuh hari seminggu. Penghasilan bersihnya sekitar Rp 40 ribu sehari. Tidak ada asuransi sosial yang terjangkau bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Karena tidak diakui sebagai penduduk Jakarta (tidak mempunyai KTP DKI), ia ditolak pemerintah kecamatan tempatnya tinggal untuk mendapatkan bantuan tunai langsung (BLT) maupun jaminan kesehatan bagi penduduk miskin (*Jamkesmas*). Sakit-penyakit dan biaya berobat merupakan keadaan darurat bagi keluarganya.

Seorang laki-laki pengemudi ojek berusia 39 tahun dulu bekerja di sektor formal sebagai petugas satuan pengamanan (satpam) suatu perusahaan hingga terkena PHK di bulan Desember 2008. Bekerja dari pukul 8 pagi hingga 9 malam enam hari seminggu, ia berpenghasilan sekitar Rp 1,17 juta sebulan (dulu penghasilan bersihnya per bulan adalah Rp 1,7 juta) setelah dipotong bahan bakar, yang digunakannya untuk menghidupi istri dan anaknya yang berusia 7 tahun. Bagi keluarga ini, uang sekolah Rp 150 ribu per bulan bukanlah jumlah kecil. Ketika dulu bekerja di sektor formal sebagai satpam, ia dan keluarganya mendapat asuransi kesehatan, tetapi sekarang tidak padahal sebagai pengemudi ojek, ia mempunyai risiko jauh lebih besar terkena kecelakaan. Ia dan keluarganya tidak dianggap miskin; karena itu, tidak mendapat bantuan. Dengan tabungannya yang sedikit, ia berusaha membayar uang sekolah anaknya dan biaya berobat tetapi ia merasa suatu hari harus meminta bantuan sanak saudaranya.

Seorang ibu berusia 46 tahun dengan empat anak membuka warung makan. Suaminya bekerja secara tidak tetap di proyek-proyek konstruksi, membawa penghasilan tambahan bagi rumah tangganya. Ketika suaminya kehilangan pekerjaan di tahun 2006, ibu ini menggunakan uang pesangon suaminya dan mulai berjualan makanan siap saji di depan rumah. Hari-harinya dimulai dari pukul 5 pagi saat ia pergi ke pasar hingga tutup warung pukul 8 malam. Ia dibantu salah seorang kerabatnya. Sebagian besar pelanggannya adalah buruh yang tinggal di kampungnya. Sejak bulan-bulan lalu, penjualan mulai berkurang menjadi antara dua per tiga dan setengah dari biasanya karena pelanggan sekarang mencari makanan yang lebih murah. Akibat berkurangnya penghasilan secara drastis, ibu ini terpaksa harus memangkas pengeluaran keluarga: antara lain dengan mengurangi kunjungan ke keluarga/teman, mengonsumsi makanan yang jauh lebih murah (tempe dan tahu sebagai pengganti ikan dan ayam), mengurangi susu untuk cucunya yang berusia 15 bulan, dan sedapat mungkin tidak

menggunakan telepon selulernya. Akan tetapi, pengorbanan ini tidaklah cukup. Baru-baru ini, ia tidak punya pilihan lain selain mengurangi biaya pengobatan bagi ibunya yang berusia 65 tahun yang menderita asma akut.

Sumber: wawancara di Jakarta atas permintaan ILO.

Akibat menurunnya permintaan, beberapa perusahaan terpaksa melakukan ‘penyesuaian’ terhadap tenaga kerjanya tanpa memangkas pekerjaan. Penyesuaian tersebut meliputi pengurangan jam kerja, termasuk lembur, pengurangan gelombang kerja harian (untuk buruh pabrik), dan merumahkan pekerja dengan tetap membayar upah pokok tetapi tanpa memberikan tunjangan transportasi.⁷ Langkah-langkah ini sering kali perlu dilakukan dalam situasi krisis tetapi tantangan utamanya terletak dalam menemukan titik keseimbangan yang dapat memastikan keberlanjutan usaha di satu sisi dengan perlindungan tenaga kerja dan penghormatan pada hak-hak tenaga kerja di sisi yang lain.

Implementasi upaya alternatif untuk penghematan

Kotak 1.2 **Melakukan investasi untuk pemulihan: pekerja dan produktivitas**

Manajemen pabrik garmen yang besar di Jawa Barat memandang krisis global saat ini sebagai peluang untuk melakukan investasi dalam tenaga kerjanya dan meningkatkan produktivitas. Setelah berkonsultasi dengan serikat pekerja, manajemen memutuskan untuk mengurangi lembur karena volume pesanan yang masuk berkurang antara 10 hingga 15 persen. Sembari berkomitmen mempertahankan pekerjaan, perusahaan telah memprakarsai gerakan perampingan produksi dan terus-menerus melakukan pengetesan dan melaksanakan saran-saran karyawan berkenaan peningkatan produktivitas. Manajemen mengharapkan volume pesanan meningkat pada akhir tahun 2009 atau di tahun 2010. Manajemen berharap berada dalam posisi yang lebih kuat di pasar begitu perekonomian global mulai pulih. Perusahaan percaya bahwa mempertahankan tenaga kerjanya dan melakukan investasi untuk meningkatkan produktivitas mereka saat usaha sedang lesu adalah tindakan yang tepat dari segi usaha.

Sumber: wawancara kasus.

⁷ Informasi diperoleh melalui diskusi dengan organisasi pengusaha. Misalnya, *the Business Tendency Survey (BTS)* (Survei Kecenderungan Usaha) triwulan terakhir tahun 2008 mengungkapkan tren berkurangnya jam kerja di kalangan perusahaan besar dan menengah di sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan/galian.

*Dialog sosial
adalah kunci untuk
menemukan solusi
dan membatasi
dampak sosial
negatif lainnya*

Akan tetapi, bagi beberapa pekerja, penyesuaian seperti itu dapat dirasakan sangat merugikan dan mendorong mereka sendiri dan keluarganya ke jurang kemiskinan. Karena sebelum krisis pun Indonesia sudah sangat rawan kemiskinan, maka pengurangan jam kerja misalnya dapat berakibat mengurangi penghasilan rumah tangga dan dalam beberapa hal menyebabkan yang bersangkutan jatuh miskin.⁸ Penghasilan yang lebih rendah juga dapat memaksa rumah tangga miskin memangkas investasi jangka panjang seperti pendidikan dan menyuruh anak bekerja untuk menambah penghasilan rumah tangga, sehingga memperburuk persoalan perburuhan anak. Di keluarga miskin dengan sejumlah anak, sering kali anak perempuanlah yang berisiko dikeluarkan dari sekolah dan disuruh bekerja pada usia dini, sebagaimana terjadi sewaktu krisis keuangan Asia tahun 1997/98.⁹ Penguatan tatanan hubungan industrial dan dukungan bagi terwujudnya dialog sosial di tingkat perusahaan, sektoral dan nasional adalah penting guna memastikan solusi berkelanjutan yang dihasilkan dari negosiasi bagi restrukturisasi perusahaan dan untuk mengurangi dampak sosial yang lebih luas.

1.3 Kelompok-kelompok rentan

*Banyak TKI sudah
kembali ke tanah air*

Penting diingat bahwa dampak krisis terhadap pasar tenaga kerja Indonesia berbeda-beda di setiap rumah tangga, kelompok dan lokalitas. Salah satu kelompok yang kerentanannya meningkat akibat krisis dewasa ini adalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri (TKI). Kelompok tenaga kerja ini sering kali adalah kelompok pertama yang terkena PHK saat perekonomian lesu. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan di bulan Desember 2008 bahwa 250.000 TKI terkena PHK dan terpaksa pulang sebelum kontrak mereka berakhir.¹⁰ Di sisi lain, TKI, terutama yang baru tiba di luar negeri, telah banyak mengeluarkan waktu, tenaga dan biaya untuk dapat menjadi TKI dan bekerja di luar negeri termasuk untuk perjalanan dan menyesuaikan diri di negara asing tempatnya bekerja, oleh karena itu, kembali ke Indonesia sering kali bukan pilihan. Dalam keadaan seperti itu, mereka pada umumnya terpaksa bersedia menerima kondisi kerja apa saja asal dapat tetap bekerja. Pada saat yang sama, harapan calon TKI untuk dapat bekerja di luar negeri menguap seiring dengan kebijakan berbagai negara yang berhenti mengeluarkan izin kerja bagi tenaga kerja asing atau mengurangi jatah lowongan kerja yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing.

8 Misalnya, 16,7 persen penduduk Indonesia yang disurvei terhitung miskin di tahun 2004, tetapi lebih dari 59 persennya pernah tergolong miskin pada suatu saat selama tahun lalu dan lebih dari 38 persen pekerja yang tergolong miskin di tahun 2004 tidak termasuk kategori miskin di tahun sebelumnya; ini mengilustrasikan tingginya tingkat kerentanan terhadap kemiskinan di Indonesia. Lihat publikasi Bank Dunia berjudul: *Making the New Indonesia work for the poor* (Jakarta, 2006).

9 ILO: *Give Girls a Chance: Tackling child labour, a key to the future* (Jenewa, 2009). Lihat juga: A. Priyambada: *What Happened to Child Labor in Indonesia during the Economic Crisis? The Trade-off between School and Work*, Kertas Kerja Ekonomi Perburuhan No. 87 (Biro Asia Timur Riset Ekonomi 2002) dan G. Thijs dan H. van de Glind: *The Asian Economic Crisis and Child Labour with a particular focus on Thailand and Indonesia*, Kertas Kerja Kantor Regional ILO untuk Wilayah Asia dan Pasifik (ILO, 1998).

10 The Jakarta Post: *"250,000 migrant pekerja sent home"*, 18 Desember 2009.

Kotak 1.3

Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Jumlah TKI di luar negeri cenderung terus meningkat sampai saat krisis global menjadi kian parah. Pada tahun 2007, TKI yang mengikuti prosedur resmi pergi ke luar negeri untuk bekerja berjumlah 697.000 orang; namun, TKI yang ke luar negeri tanpa dokumen berjumlah sekurang-kurangnya dua kali lipatnya. Letak geografi yang berdekatan, kemiripan dari segi budaya dan bahasa, dan keberadaan jaringan TKI, membuat Malaysia menjadi tempat bagi banyak TKI tak berdokumen. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) memperkirakan, pada bulan Desember 2008 terdapat 5,8 juta¹¹ TKI, termasuk yang tanpa dokumen. Sekitar 65 persen TKI, termasuk TKW, adalah pekerja rumah tangga yang menyebar di 41 negara.¹² Sekitar setengah dari seluruh TKI yang ada dipekerjakan di Malaysia. Yang lainnya bekerja di Timur Tengah, Singapura, Hong Kong (China) dan Taiwan. Perkebunan dan tempat-tempat konstruksi umumnya menjadi tempat kerja bagi TKI. Beberapa TKI dipekerjakan di sektor industri pengolahan di negara-negara Asia lainnya. Uang yang dikirimkan TKI ke tanah air telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini dan diperkirakan mencapai USD 12 milyar di tahun 2008.¹³

Pengetatan ketentuan yang mengatur PJTKI dan administrasi migrasi tenaga kerja yang lebih efisien akan memastikan adanya manajemen migrasi tenaga kerja dan perlindungan hak asasi tenaga kerja migran yang lebih baik. Di samping itu, pemerintah perlu menegosiasikan saluran-saluran baru migrasi melalui perjanjian bilateral, seraya juga memberikan jaminan hak-hak tenaga kerja, memastikan perlindungan konsular, dan mengurangi biaya migrasi. Tantangan lainnya adalah untuk memaksimalkan dampak pengiriman uang ke tanah air terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan secara berkelanjutan dengan mengurangi biaya pengiriman uang ke tanah air dan dengan mendorong investasi produktif. Ini dapat diorganisasikan berdasarkan sektor, misalnya, dengan partisipasi aktif organisasi pengusaha dan pekerja yang relevan.

11 *ibid*

12 *ibid*

13 *Indonesia Trade and Investment News*, 6 Oktober 2008. Dapat dilihat di situs internet berikut: http://www.indonesia.go.id/en/index.php?option=com_content&task=view&id=7713&Itemid=718).

Kotak 1.4

Kisah-kisah manusia: TKI yang kembali ke tanah air

Kisah #1 TKI yang pulang ke tanah air

Seorang pekerja pabrik perempuan berusia 30 tahun dengan pendidikan SMK dipulangkan sebelum waktunya di bulan Maret 2009 setelah di-PHK dari pabrik perusahaan elektronik di Malaysia. Ia dipulangkan enam bulan sebelum kontrak kerja sesungguhnya berakhir, dan tidak menerima ganti rugi atas PHK dini tersebut. Ia sedang mencari pekerjaan apa saja asal halal melalui keluarga dan teman-temannya. Meskipun di dinas tenaga kerja setempat tercantum beberapa lowongan kerja, ia tidak dapat memenuhi syarat pendidikan dan batas usia. Menyadari rendahnya peluang yang dimilikinya untuk mendapatkan pekerjaan, ia mencoba berwirausaha sendiri dengan membuka usaha jahit-menjahit, dan untuk itu ia perlu membeli mesin jahit. Akan tetapi, sulit baginya untuk meminjam uang dari bank atau dari lembaga pembiayaan mikro karena ia tidak mampu memberikan jaminan yang diperlukan. Ia bermaksud bekerja dan menabung untuk usahanya di masa depan. Keluarganya hidup dari pendapatan yang diperoleh dari warung yang dijalankan ibunya dan dari uang pensiun bulanan janda (sekitar Rp. 700.000) karena almarhum ayahnya dulu bekerja di angkatan darat. Sewaktu dulu masih menjadi TKI, biasanya ia dapat mengirim uang sekitar Rp. 1.500.000 per bulan untuk menghidupi keluarganya.

Kisah #2 TKI yang pulang ke tanah air

Seorang pekerja berusia 36 tahun pergi ke Taiwan (China) untuk bekerja sebagai pekerja konstruksi. Untuk membayar uang jasa penyalur tenaga kerja sebesar Rp 39 juta, ia harus menjual mobilnya dan merelakan upahnya dipotong Rp. 1.000.000 tiap bulan selama setahun. Saat tiba di Taiwan, barulah ia tahu bahwa upahnya masih dipotong lagi sekitar Rp.540.000 setiap bulannya sebagai imbalan untuk agen penerima tenaga kerja asing di Taiwan. Oleh sebab itu, upahnya sekitar Rp. 4.800.000 harus digunakan untuk menutup biaya agen, pajak dan biaya hidup dan makannya sendiri. Hampir tak ada yang dapat dihematnya dalam setahun. Setelah kontraknya diputus di bulan Desember 2007, ia dipulangkan ke tanah air dan menjadi petani lagi. Ia juga membantu di toko ayahnya. Ia berusaha mencari pekerjaan apa saja, terutama di dekat rumah, tetapi belum ada hasilnya. Jaringan sosial seperti teman, kenalan dan kerabat menjadi andalan utamanya dalam mencari pekerjaan, karena keterampilannya tidak memenuhi syarat pekerjaan yang diiklankan di koran. Setelah perjuangan yang dialaminya dan merasa dieksploitasi, ia tidak lagi mempunyai keinginan untuk bekerja di luar negeri.

Kisah #3 TKI yang pulang ke tanah air

Seorang pekerja perempuan berusia 35 tahun dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di Hong Kong (China) dari tahun 2004 sampai ia di-PHK di bulan Juli 2008 karena perusahaan majikannya bangkrut.

Dulu ia dapat mengirim uang sekitar Rp. 3.000.000 per bulan ke rumah. Sekarang, ia membuat kue-kue dan menjualnya di sekolah didekat rumahnya untuk menambah penghasilan keluarga. Suaminya bertani dan beternak. Ia merencanakan untuk membuka toko kelontong tetapi kesulitan modal. Di samping itu, ia punya pendidikan SMA tetapi tidak punya pengalaman nyata dalam berbisnis. Ia berharap pemerintah daerah akan memberikan pelatihan keterampilan manajemen dan modal untuk memulai usaha. Meskipun ia ingin mempunyai usaha sendiri, ia memilih bekerja untuk upah asalkan upahnya lebih dari Rp. 1.000.000 per bulan. Namun demikian, pada kenyataannya jarang ada kesempatan kerja bagi pasangan ini.

Kisah #4 TKI yang pulang ke tanah air

Seorang pekerja berusia 36 tahun dengan latar pendidikan SD pergi ke Malaysia dan bekerja pada seorang subkontraktor bangunan antara tahun 2003 hingga September 2008. Majikannya tidak membayar upah selama dua bulan. Tuntutan pekerja akan pembayaran upah dijawab perusahaan dengan mengembalikan paspor mereka. Baginya, menerima kembali paspornya berarti izin kerjanya sudah habis. Meskipun ia menemukan pekerjaan informal di proyek konstruksi lain, ia harus bekerja tanpa asuransi kesehatan dan tanpa perlindungan agen yang mencegah kemungkinan terjadinya eksploitasi. Ia meninggalkan Malaysia karena mengkhawatirkan status hukumnya. Ketika di Malaysia, ia berpenghasilan Rp. 90.000 sehari dan mengirim ke rumah Rp. 8.000.000 setahun. Ia adalah pencari nafkah utama keluarganya, menghidupi istri dan ketiga anaknya. Setelah pulang ke tanah air, ia menjadi petani lagi. Ia juga merupakan anggota dewan pengurus koperasi yang memproduksi kerupuk. Meskipun ia mempunyai penghasilan dari bertani dan dari koperasi, ia bersedia mengambil pekerjaan di pabrik yang memberinya penghasilan sekurang-kurangnya Rp. 900.000 per bulan dengan tempat tinggal dan makan. Stabilitas pendapatanlah yang ia cari.

Sumber: wawancara kasus oleh pengarang di Malang, Jawa Timur.

Dampak krisis global terhadap Indonesia juga menimbulkan kekhawatiran tambahan bagi tenaga kerja muda dan perempuan. Bahkan sebelum krisis, tenaga perempuan dan laki-laki usia muda di Indonesia (usia 15–24) mempunyai kemungkinan hampir 4,9 kali tenaga kerja usia dewasa untuk tidak bekerja, dan tingkat pengangguran di kalangan tenaga kerja usia muda adalah 23,3 persen di tahun 2008. Krisis global kemungkinan telah memperburuk masalah pekerjaan bagi kaum muda di Indonesia yang sudah parah, dimana pekerja muda yang tidak berpengalaman paling mungkin menjadi korban pertama PHK dan calon terakhir yang dipertimbangkan untuk diterima bekerja.

Situasi perempuan dan laki-laki muda dalam pasar tenaga kerja cenderung memburuk

*Banyak perempuan
menanggung
beban ganda yang
semakin berat untuk
mengurus keluarga
sekaligus bekerja
mencari nafkah*

Perempuan juga menghadapi situasi sulit dalam pasar tenaga kerja sebelum krisis: angka pengangguran di kalangan perempuan – sebesar 9,7 persen di tahun 2008 – jauh lebih tinggi daripada angka pengangguran di kalangan laki-laki (7,6 persen), dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk berada dalam hubungan kerja yang rawan PHK daripada laki-laki. Di samping itu, perempuan cenderung harus menanggung beban ganda mengurus keluarga dan mencari nafkah sebagaimana yang mereka alami ketika terjadi krisis keuangan Asia. Misalnya, partisipasi tenaga kerja perempuan di sektor pertanian meningkat antara 1997 dan 1998, baik sebagai pekerja yang bekerja sendiri (dengan kenaikan sebesar 803,600) maupun sebagai anggota keluarga yang diperbantukan untuk bekerja tanpa dibayar (670,700). Ini merupakan kompensasi bagi berkurangnya upah yang dibawa pulang laki-laki dan tingginya inflasi semasa krisis. Sementara jam kerja tenaga kerja laki-laki mengalami pengurangan, tenaga kerja perempuan mencatat kenaikan bersih dalam jam kerja karena mereka bekerja lembur dan mengambil pekerjaan sampingan.¹⁴

*Dampak utamanya
adalah pada
pasar tenaga kerja
perkotaan, namun
dampaknya pada
daerah pedesaan
tidak dapat
diremehkan*

Dengan ekspor menjadi salah satu saluran utama transmisi krisis di Indonesia, pasar tenaga kerja perkotaanlah yang paling terpengaruh. Meskipun demikian, dampaknya terhadap perekonomian pedesaan tidak dapat diremehkan. Hilangnya lapangan kerja di daerah perkotaan ikut mendorong terjadinya proses perpindahan penduduk dari kota ke desa dan banyak dari mereka yang kembali ke desa cenderung berkecimpung dalam kegiatan informal yang lebih rendah produktivitasnya. Perpindahan dari perkotaan ke pedesaan sebenarnya juga sudah terlihat pada tahun 2008 ketika krisis pangan dan bahan bakar global cenderung mendorong penduduk desa yang tinggal di kota untuk kembali ke desa karena biaya hidup di desa pada umumnya lebih murah daripada di kota.

1.4 Pemulihan yang tersendat-sendat dalam pasar tenaga kerja

*Indikator pasar
tenaga kerja
memerlukan waktu
bertahun-tahun
untuk kembali ke
tingkat sebelum
krisis*

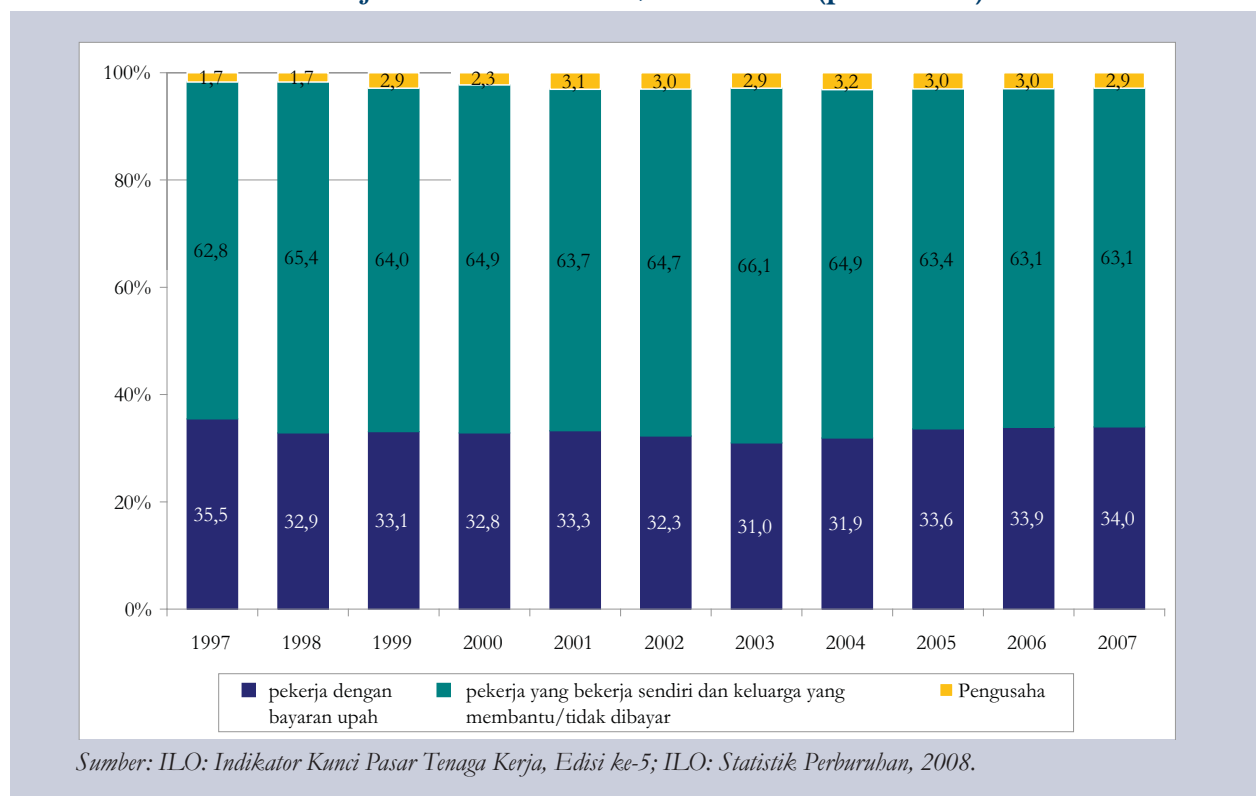
Pada saat laporan ini ditulis, perekonomian global sedang menunjukkan beberapa tanda awal “menuju pemulihan.” Sekalipun ini merupakan perkembangan yang menggembirakan bagi Indonesia, penting untuk diingat bahwa dampak sepenuhnya resesi global dalam pasar tenaga kerja Indonesia mungkin masih belum terlihat nyata dan konsekuensinya bagi tenaga kerja Indonesia bisa dalam dan berlarut-larut. Dalam krisis keuangan Asia yang sebelumnya terjadi, berbagai indikator pasar tenaga kerja memerlukan waktu lama untuk kembali ke tingkat sebelum krisis. Misalnya, tingkat pengangguran di Indonesia di tahun 1996 sebesar 4,9 persen, meningkat

¹⁴ R. Islam dkk: “*The economic crisis: labour market challenges and policy in Indonesia*”, dalam G. Betcherman dan R. Islam, eds: *East Asian pasar tenaga kerjas dan the ekonomi krisis: Impacts, responses dan lessons* (Bank Dunia dan ILO, 2001).

tajam akibat krisis dan hanya jatuh hampir ke tingkat sebelum krisis sebesar 5,1 persen di tahun 2001.¹⁵

Di samping itu, krisis keuangan Asia tidak hanya berdampak terhadap tingkat pengangguran di Indonesia tetapi yang lebih penting, terhadap jumlah pekerja dalam lapangan kerja yang rawan pengangguran: dalam satu tahun saja, dari 1997 ke 1998, pekerjaan berupah di sektor formal menyusut sebesar 1,5 juta (4,9 persen), sementara jumlah pekerja yang dikategorikan sebagai pekerja yang bekerja sendiri atau anggota keluarga yang ikut bekerja berkontribusi naik sebesar 3,7 juta (6,8 persen) (lihat juga Kotak 1.4). Meskipun perekonomian Indonesia mulai pulih tahun 1999, andil atau porsi pekerja yang bekerjasendiri dan anggota keluarga yang ikut membantu bekerja terus meningkat, dan porsi ini hanya mendekati tingkat sebelum krisis pada tahun 2006 (Gambar 1.3).

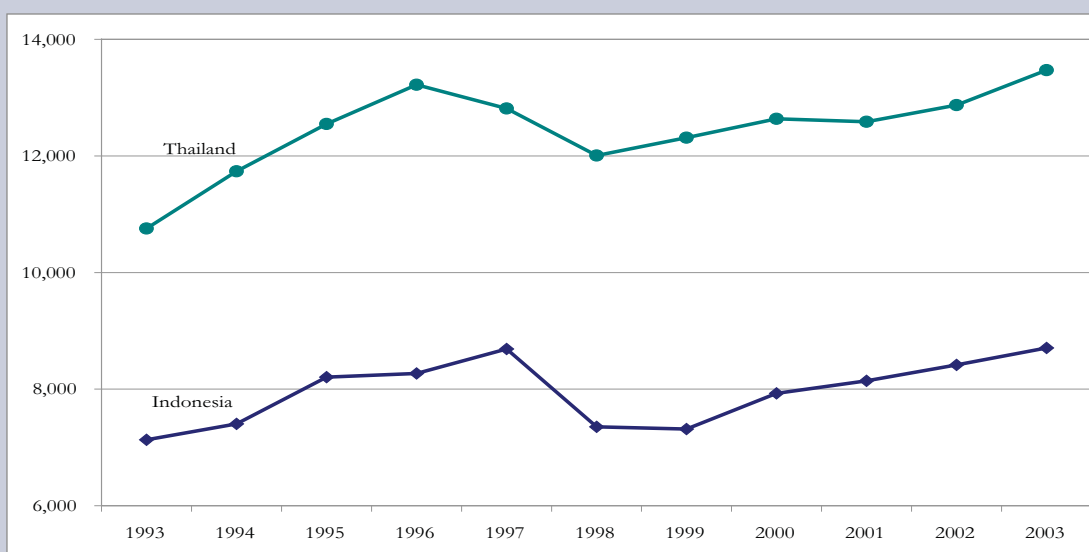
Gambar 1.3
Pekerjaan menurut status, 1997–2007 (persentase)



15 Terhadap angka pengangguran 5,1 persen dilakukan penyesuaian sehubungan dengan perubahan definisi pengangguran di tahun 2001. Tanpa penyesuaian, angka pengangguran resmi adalah 8,1 persen pada tahun 2001 tetapi angka ini tidak dapat dibandingkan dengan angka-angka tahun sebelumnya.

Produktivitas tenaga kerja di Indonesia tidak luput dari pengaruh krisis keuangan Asia, turun sebesar 15,4 persen dan hanya mencapai tingkat sebelum krisis pada tahun 2003 (Gambar 1.4). Proses pemulihan yang berlarut-larut ini tidak hanya disaksikan di Indonesia saja tetapi juga di negara-negara Asia lainnya seperti Thailand. Hal lain yang sangat mengkhawatirkan adalah meningkatnya kemiskinan dan tingkat penduduk miskin yang bekerja. Meskipun Indonesia memperoleh kemajuan yang luar biasa dalam mengurangi kemiskinan dalam dasawarsa sebelum krisis, tingkat kemiskinan nasional naik lebih dari sepertiganya selama krisis dan juga mengalami pemulihan ke tingkat sebelum krisis hanya di tahun 2003.¹⁶

Gambar 1.4
Output per pekerja (1990 USD), Thailand dan Indonesia, 1993–2003



Sumber: *The Conference Board and Groningen Growth and Development Centre [Dewan Konperensi dan Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Groningen]*, Pangkalan Data Perekonomian Total (Januari 2009).

Kotak 1.5 Respons pasar tenaga kerja selama krisis keuangan Asia

Telaah terhadap perubahan-perubahan dalam lapangan kerja selama krisis keuangan Asia mengungkapkan terjadinya penurunan tajam dalam lapangan kerja formal: jumlah pekerjaan non-pertanian yang dibayar mengerut 2,1 juta (0,3 juta di antaranya pekerjaan perempuan) antara Mei 1997 dan 1998 (Tabel 1.4). Hilangnya pekerjaan laki-laki secara signifikan terjadi di sektor industri pengolahan (1,3 juta pekerjaan) dan sektor konstruksi (678,000 pekerjaan). Bagi perempuan, hilangnya pekerjaan paling terasa di sektor industri pengolahan (575,000) dan di industri perdagangan besar (grosir), eceran, restoran dan hotel (247,000). Sektor pertanian menyerap sebagian besar tenaga kerja ter-PHK ini dengan mengorbankan produktivitas tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja

16 World Bank: *Making the New Indonesia Work for the Poor* (Jakarta, 2006).

laki-laki dalam industri primer mencatat kenaikan sebesar 8,7 persen antara 1997 dan 1998 dan penempatan tenaga kerja perempuan 11,9 persen. Sebagai konsekuensinya, produktivitas tenaga kerja pertanian diukur dari PDB per tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor tersebut menurun dari USD 1,066 [Rp 10.660.000] di tahun 1997 menjadi USD 953 [Rp. 953.000] di tahun 1998 (nilai tukar dolar Amerika pada 1997 konstan, sumber: ILO, edisi kelima KILM.).

Selama krisis keuangan Asia, pasar tenaga kerja Indonesia menarik lebih banyak peserta. Ketika pendapatan keluarga berkurang akibat hilangnya pekerjaan anggota keluarga atau pemotongan jam kerja, strategi penanggulangan yang biasanya dilakukan adalah dengan menyuruh atau meminta anggota keluarga yang lain untuk bekerja menambah penghasilan rumah tangga (efek tenaga kerja tambahan). Efek ini semakin memperparah kondisi pasar tenaga kerja, memperberat tekanan ke bawah terhadap kondisi kerja. Akibatnya, jumlah penduduk miskin yang bekerja mengalami kenaikan tajam. Dari seluruh lapangan kerja yang ada, jumlah penduduk miskin bekerja berpenghasilan USD 1 sehari menjadi hampir dua kali lipatnya antara tahun 1996 (yaitu menjadi 17,9 persen) dan tahun 1998 (menjadi 33,7 persen)*.

* Sumber: ILO: Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja (KILM), Edisi Kelima.

Tabel 1.4:
Lowongan kerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin,
1997–1998 (dalam ribuan)

	Total		Laki-laki		Perempuan	
	Mei 97	Mei 98	Mei 97	Mei 98	Mei 97	Mei 98
Total	87.050	87.674	53.971	53.901	33.079	33.773
Dari total tersebut, jumlah pekerjaan berbayar di sektor non-pertanian adalah	25.677	23.595	17.963	16.210	7.714	7.385
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	35.849	39.415	21.960	23.871	13.889	15.544
Pertambangan dan Penggalian	897	675	710	574	186	101
Industri pengolahan	11.215	9.934	6.189	5.482	5.026	4.451
Listrik, Gas dan Air	233	148	214	131	19	17
Bangunan	4.200	3.522	4.050	3.386	150	136
Perdagangan Besar, Eceran, Restoran dan Hotel	17.221	16.814	8.404	8.245	8.817	8.570
Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi	4.138	4.154	4.023	4.024	115	130
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa	657	618	447	412	209	206
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	12.637	12.394	7.972	7.775	4.666	4.619
<i>Sumber: perhitungan pengarang menggunakan data dari Laborsta (statistik perburuhan), ILO</i>						

1.5 Respons kebijakan

Respons kuat pemerintah

Mengingat dampak krisis global terhadap perekonomian Indonesia dan pasar tenaga kerjanya, pemerintah Indonesia telah menanggapi dengan cepat dengan mengumumkan, antara lain, paket stimulus yang ditujukan untuk mendorong permintaan agregat senilai Rp. 73,3 triliun (USD 7,3 milyar, kira-kira 1,4 persen PDB). Komponen terbesar paket tersebut sampai sejauh ini adalah rabat pajak (Tabel 1.5). Melalui rabat pajak ini, pemerintah berharap dapat mencegah PHK besar-besaran dengan meringankan beban perusahaan. Pemerintah juga berharap paket tersebut dapat mendorong konsumsi swasta dan mencapai pertumbuhan konsumsi swasta antara 4 dan 4,7 persen. Diharapkan dapat diciptakan tiga juta pekerjaan.

Tabel 1.5:
Komponen-komponen paket stimulus

Pemotongan pajak	
- Pemangkasan pajak bagi perusahaan, pekerja dan individu	Rp. 43,0 triliun
- Subsidi pajak dan pengecualian bea masuk	Rp. 13,3 triliun
Proyek infrastruktur dan program pemberdayaan bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan	Rp. 12,2 triliun
Subsidi solar dan listrik dan juga kredit untuk menciptakan lapangan kerja di daerah pedesaan	Rp. 4,8 triliun
Total	Rp. 73,3 triliun (USD 7,3 milyar)
<i>Sumber: Pemerintah Indonesia</i>	

Respons meliputi proyek-proyek infrastruktur padat karya

Paket stimulus juga mencakup dana sebesar hingga Rp. 12,2 triliun bagi pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan raya, pelabuhan, jembatan dan irigasi. Melalui pembangunan infrastruktur ini, pemerintah memperkirakan hingga 1,1 juta pekerja akan terserap.¹⁷ Jumlah ini juga meliputi alokasi Rp. 430 milyar untuk program pembangunan perumahan yang diharapkan dapat mempekerjakan sekurang-kurangnya 500.000 pekerja, menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

¹⁷ Situs internet resmi Republik Indonesia. Klik: www.indonesia.go.id

Kotak 1.6

Pendekatan padat karya terhadap pembangunan infrastruktur

Analisa yang dilakukan Lembaga Internasional bagi Studi Perburuhan mengungkapkan bahwa semakin besar titik berat yang diberikan pada penciptaan lapangan kerja dalam respons kebijakan, semakin kuat pula dampaknya terhadap perekonomian riil.¹⁸ Tatkala pasar tenaga kerja lesu, investasi pekerjaan umum yang bersifat padat karya di sektor infrastruktur tidak hanya menyerap surplus tenaga kerja tetapi juga memberikan suatu bentuk perlindungan sosial kepada penduduk miskin. Skema pekerjaan umum telah terbukti sanggup menyerap tenaga kerja di Indonesia selama krisis keuangan Asia.¹⁹

Pendekatan padat karya terhadap pembangunan infrastruktur merupakan alat kebijakan utama bagi penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi lokal dan pertumbuhan sektor pertanian. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan berbasis sumber daya, mengingat pendayagunaan secara optimum dan fleksibel tenaga kerja, materi (bahan), keterampilan dan kapasitas setempat yang ada. Metode ini dapat mencapai standar kualitas yang sama seperti pendekatan berbasis peralatan dalam membangun infrastruktur secara lebih efektif dari segi biaya. Pendekatan padat karya mempunyai berbagai keunggulan komparatif melebihi pendekatan berbasis peralatan:

- penciptaan pekerjaan yang lebih produktif;
- perbaikan dalam distribusi pendapatan;
- pengurangan beban lingkungan menggunakan bahan-bahan yang dapat diperbarui;
- efek berlipat kali (*multiplier*) yang tinggi terhadap perekonomian lokal;
- mempromosikan keadilan gender dan kepemilikan lokal.

Keunggulan-keunggulan ini tergantung pada (sub)sektor, jenis kegiatan dan faktor lainnya, termasuk ketersediaan tenaga kerja dan bahan bangunan lokal. Pendekatan berbasis peralatan dan pendekatan berbasis sumber daya dapat digunakan sebagai upaya pelengkap.

Menurut perkiraan ILO*, investasi senilai Rp. 12,2 triliun di sektor infrastruktur, sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya dalam paket stimulus pemerintah, akan menciptakan hingga sekitar 1,2 juta pekerjaan lagi apabila pendekatan berbasis sumber daya diambil sebagai ganti metode pendekatan berbasis peralatan. Pendekatan berbasis sumber daya terhadap pembangunan infrastruktur memaksimalkan efek penciptaan lapangan kerja dari pengeluaran publik.

18 ILO: *The financial and economic crisis: A decent work response* (Jenewa, 2009).

19 Lihat G. Betcherman dan R. Islam, eds.: *East Asian labour markets and the economic crisis: Impacts, responses and lessons* (Bank Dunia dan ILO, Washington, DC, 2001).

Selain itu, pembangunan ekonomi padat karya pedesaan memberikan solusi bagi pengangguran terbuka yang masih tetap tinggi dalam perekonomian formal perkotaan, sebagaimana diprediksi oleh model analisa pasar tenaga kerja multisektor Harris-Todaro beserta variannya. Di mana terjadi perbedaan upah antara dua sektor, kebijakan yang menciptakan lapangan kerja dalam perekonomian formal perkotaan akan begitu saja menarik lebih banyak pekerja ke sektor yang bersangkutan dan gagal mengurangi pengangguran. Sebagai alternatif, pembangunan pedesaan yang memperbaiki upah perekonomian informal akan mengurangi pengangguran perkotaan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis sumber daya terhadap pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan dapat mengatasi tingginya pengangguran dalam perekonomian formal perkotaan.

ILO telah dan masih bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan mitra sosialnya dalam hal penggunaan metode padat karya bagi perbaikan infrastruktur selama 15 tahun.

Sumber: B. Athmer: "Sector approaches to employment: Lessons dan recommendations for Indonesia" [Pendekatan sektoral terhadap lapangan kerja: pelajaran dan rekomendasi bagi Indonesia], dokumen kebijakan yang tidak dipublikasikan (ILO, Jakarta, 2009).

Memperkuat bantuan bagi penduduk miskin

Pemerintah juga telah secara signifikan meningkatkan alokasi anggaran negara bagi program-program pengentasan kemiskinan. Dalam tahun fiskal 2009, pemerintah mengalokasikan Rp. 66 triliun untuk mengurangi kemiskinan, naik dari Rp. 58 triliun yang dikucurkan dalam tahun fiskal 2008. Dari seluruh jumlah tersebut, Rp. 15 triliun diperuntukkan bagi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Rp. 12 triliun bagi program beras bagi penduduk miskin dan Rp. 11 triliun bagi Bantuan Operasi Sekolah (BOS). PNPM diharapkan dapat mencakup 6,408 kecamatan dan 78,000 desa di tahun 2009, menyerap 3 hingga 4 juta pekerja.²⁰

Program-program peningkatan keterampilan

Pemerintah Indonesia juga sedang berusaha untuk meningkatkan daya saing pekerja, dan telah mengalokasikan Rp. 369 milyar (USD 33 juta) untuk pelatihan kejuruan, Rp. 110 milyar untuk pelatihan di sektor-sektor padat karya dan Rp. 30 milyar untuk membina jaringan tenaga kerja. Pada tahun 2009 akan ada lebih banyak sekolah kejuruan didirikan, dengan prioritas pada program-program informasi dan teknologi. Pemerintah juga sedang berusaha memperkuat hubungan dengan industri dari industri perbankan hingga industri penerbangan dengan tujuan untuk meningkatkan keefektifan program dan hasil akhir upaya penciptaan dan penempatan tenaga kerja. Selain itu, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga ikut berusaha membina tingkat keterampilan dan pengetahuan pekerja yang mencari peluang kerja di luar negeri supaya TKI dapat mengisi lebih banyak lowongan kerja di sektor formal seperti administrasi medis dan bisnis.²¹ Balai Latihan

²⁰ Situs internet resmi Republik Indonesia. Dapat dilihat di: www.indonesia.go.id

²¹ *ibid*

Kerja Luar Negeri diharapkan memainkan peran penting untuk mewujudkan hal ini dengan memberikan pelatihan keterampilan dan juga pelatihan bahasa dan budaya kepada calon TKI sebelum berangkat ke luar negeri.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan upaya menuju terwujudnya perekonomian yang berwawasan lingkungan. Langkah-langkah itu antara lain dilakukan dengan menyediakan pinjaman atau kredit kepada industri dengan suku bunga yang lebih rendah daripada suku bunga pasar supaya mesin-mesin lama dapat diganti dengan mesin-mesin yang lebih baru dan lebih efisien. Mengingat tingginya biaya modal di Indonesia, inisiatif ini akan mempersempit kesenjangan investasi yang sangat dibutuhkan. Pemerintah sedang berusaha merampingkan badan-badan usaha milik negara di industri panas bumi yang sedang tumbuh dengan maksud untuk menarik dana lebih banyak dari donor untuk menggali potensi panas bumi terbesar di dunia.

Investasi yang ramah lingkungan

1.6 Implikasi kebijakan

Analisa dampak krisis global terhadap perekonomian Indonesia, pasar tenaga kerja, penyesuaian berkepanjangan dalam pasar tenaga kerja dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggapi krisis menyoroti sejumlah implikasi kebijakan.

Pertama, harus disadari adanya kebutuhan untuk menempatkan pekerjaan yang layak dan produktif sebagai titik pusat dalam menghadapi krisis dan dalam kebijakan ekonomi dan sosial sehari-hari. Penilaian yang baru-baru ini dilakukan terhadap efek yang diperkirakan timbul dari berbagai langkah fiskal terhadap penciptaan lapangan kerja, misalnya, mengungkapkan bahwa “semakin besar orientasi langkah fiskal tersebut terhadap penciptaan lapangan kerja, semakin kuat pula stimulusnya terhadap perekonomian riil”.²² Paket stimulus Indonesia merupakan respons yang kuat tetapi besarnya porsi keringanan pajak dalam paket stimulus menyiratkan bahwa fokus yang lebih besar pada UKM dengan kendala likuiditas dan kelompok-kelompok rentan seperti penganggur, penduduk miskin, dan penduduk di ambang kemiskinan akan mempunyai efek yang bahkan lebih besar lagi dalam meningkatkan permintaan agregat dan meningkatkan potensi pertumbuhan Indonesia dalam jangka menengah dan jangka panjang. Ini karena pengurangan pajak sering kali tidak mempunyai output atau efek langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, dan dampak tidak langsungnya tergantung pada bagaimana perusahaan dan rumah tangga bereaksi terhadap kenaikan dalam pendapatan mereka. Dalam lingkungan saat ini, perusahaan tidak hanya menghadapi

Fokus yang lebih tajam pada pekerjaan yang produktif dan layak

22 ILO: *The Financial and Economic Crisis: A Decent Job Response* (Jenewa, 2009), hal. 30-31.

anjloknya permintaan secara drastis, tetapi juga ketidakpastian tidak terduga di masa yang akan datang. Dalam situasi seperti ini, mereka sering kali mengambil sikap ‘menunggu-dan-melihat’ sehubungan dengan investasi mereka, dan rumah tangga mungkin menunjukkan perilaku serupa dalam keputusan konsumsi mereka.²³ Oleh karena itu, insentif di seluruh sektor yang ditujukan untuk bisnis atau rumah tangga kemungkinan hanya akan mempunyai efek terbatas jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan. Selain itu, di negara-negara dengan perekonomian informal yang besar, seperti Indonesia, manfaat keringanan pajak akan terbatas jangkauannya dan kemungkinan akan diperoleh oleh mereka yang relatif cukup berada dengan kecenderungan pengeluaran yang lebih rendah daripada usaha yang terbatas likuiditasnya, rumah tangga miskin dan para penganggur. Di sisi lain, apabila upaya stimulus fiskal ditujukan pada kelompok-kelompok yang terkendala likuiditasnya yang kemungkinan akan berbelanja lebih banyak, maka efek berlipat kali (*multiplier*) jangka pendek dari stimulus tersebut kemungkinan akan lebih tinggi.

Di samping itu, dalam menjalankan langkah kebijakan stimulus fiskal, adalah juga penting untuk memperhitungkan baik dampak jangka pendek terhadap permintaan agregat maupun upaya untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi untuk jangka menengah dan jangka panjang. Dalam hal ini, fokus terhadap upaya untuk mempertahankan pekerjaan produktif, penghasilan dan daya beli rumah tangga dikombinasikan dengan upaya di sisi penawaran termasuk pelatihan pendidikan dan keterampilan serta kebijakan aktif pasar tenaga kerja di masa krisis memungkinkan dilakukannya upaya penanggulangan krisis dan upaya pemulihan secara lebih komprehensif.

*Adanya kebutuhan
mendesak
akan jaminan
pengangguran*

Implikasi kunci kebijakan yang kedua adalah kebutuhan mendesak akan jaminan pengangguran di Indonesia. Kuatnya respons kebijakan pemerintah mencakup pembangunan infrastruktur, yang penting bagi penyediaan lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja tidak terampil. Pemerintah juga telah menjalankan berbagai program bantuan sosial bagi penduduk miskin, yang telah semakin diperkuat akibat krisis. Akan tetapi, apa yang kurang adalah perlindungan bagi tenaga kerja setengah terampil, terutama bagi perempuan dan mereka yang berada di ambang kemiskinan.²⁴ Mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan program-program bantuan sosial yang diperuntukkan bagi penduduk miskin dan, mengingat tingkat keterampilan mereka yang relatif lebih tinggi, pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan keterampilan yang lebih rendah dalam infrastruktur sering kali tidak mewakili alternatif-alternatif yang menarik. Selain itu, karena pekerjaan-pekerjaan infrastruktur biasanya menarik banyak tenaga kerja laki-laki, maka tidak

23 Antonio Spilimbergo et al: *Fiscal Policy for the Crisis*, IMF Staff Position Note SPN/08/2008 (Washington, DC, IMF, Desember 2008).

24 Penciptaan lapangan kerja melalui pekerjaan-pekerjaan infrastruktur dapat menimbulkan efek penciptaan lapangan kerja yang bersifat spesifik gender karena pekerjaan-pekerjaan seperti ini secara tradisional menarik tenaga kerja laki-laki.

cukup dapat menyerap banyak tenaga kerja perempuan yang terkena PHK di industri-industri yang berorientasi ekspor. Bagi kelompok-kelompok ini, jaminan pengangguran dapat berfungsi sebagai penstabil otomatis yang dapat mengurangi dampak gejolak perekonomian dan membantu mempertahankan permintaan agregat. Jaminan pengangguran juga dapat memperlambat merambatnya krisis dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan, khususnya di negara-negara yang mempunyai tenaga kerja migran pedesaan dalam jumlah besar yang telah kehilangan pekerjaan dalam industri-industri yang berorientasi ekspor.

Diperkenalkannya suatu skema awal dasar jaminan pengangguran di Indonesia akan menjadi suatu langkah penting untuk melindungi tenaga kerja dan menopang permintaan dalam negeri semasa krisis. Sistem dasar jaminan pengangguran ini dapat secara bertahap diperkokoh dan kemampuannya dalam menanggapi pengangguran juga diperkuat selama berlangsungnya kelesuan ekonomi dan memuncaknya pengangguran, misalnya dengan cara memperpanjang kurun waktu pencakupan, atau dengan melonggarkan persyaratan kepesertaan untuk sementara. Di samping itu, mengaitkan jaminan pengangguran dengan kebijakan aktif pasar tenaga kerja termasuk pelatihan, bantuan mencari pekerjaan dan panduan karir dapat menolong kelompok-kelompok yang rentan atau rawan pengangguran menepis dampak negatif pengangguran dan kembali pulih seperti sediakala.

Sebagai ganti jaminan pengangguran, Indonesia bersandar pada pembayaran uang pesangon sebagai jaminan pendapatan tenaga kerja pada saat tenaga kerja yang bersangkutan kehilangan pekerjaan. Akan tetapi, pembayaran uang pesangon belum tentu dapat memberikan jaminan pendapatan yang cukup, apalagi ketika perusahaan bangkrut; lagipula, pembayaran uang pesangon jarang dikaitkan dengan kebijakan aktif pasar tenaga kerja.²⁵ Selain itu, pembayaran uang pesangon sering kali tidak dilaksanakan. Karenanya, jaminan pengangguran menjadi unsur pokok batas minimum perlindungan sosial, dan ini akan dibahas dalam bab berikutnya.

Implikasi kebijakan kunci yang ketiga adalah adanya kebutuhan penting akan dialog sosial dalam merancang respons kebijakan. Selama krisis, dialog sosial dapat membantu memperbaiki rancangan upaya untuk menanggapi krisis di tingkat perusahaan, industri dan nasional, dan juga memberikan dukungan politik untuk paket fiskal dan kebijakan pemerintah lainnya. Dialog antar mitra tripartit dapat juga digunakan untuk mencari solusi melalui negosiasi untuk menjawab tantangan utama dalam jangka panjang. Dialog dan perundingan bersama semacam itu dapat membantu menghindari terjadinya keresahan sosial, menjauhkan terjadinya perselisihan industrial yang sangat merugikan, mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, dan mengupayakan terwujudnya kohesi sosial.

Pentingnya dialog sosial

25 D. MacIsaac dan M. Rama: *Mandatory Severance Pay in Peru: An Assessment of its Coverage Using Panel Data* (Bank Dunia, Washington, DC, 2006).

Pasal 107 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Lembaga-lembaga ini menjadi forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antara pemerintah dan mitra sosial. Di bulan Mei 2009 terdapat 29 lembaga semacam itu di tingkat nasional dan 195 di tingkat kabupaten. Akan tetapi, baik LKS Tripartit maupun tatanan hubungan industrial secara umum memerlukan dukungan dan penguatan lebih lanjut.

*Diperlukan
informasi dan
statistik pasar
tenaga kerja yang
lebih baik*

Krisis juga menyoroti pentingnya pasar tenaga kerja di bidang informasi dan statistik. Informasi dan statistik terkini yang dipilah khusus menurut gender dan usia sangatlah penting bagi pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang sebelumnya telah diberikan dan dalam dialog sosial antar pemerintah, pengusaha dan pekerja. Informasi dan statistik semacam itu digunakan untuk melakukan pemantauan jarak dekat terhadap pasar tenaga kerja, mendeteksi tanda-tanda awal perubahan dan merancang serta mengalokasikan sumber daya secara memadai bagi respons kebijakan. Di samping itu, informasi dan statistik tersebut membantu pengusaha dalam keputusan operasi usaha mereka dan juga membantu pencari kerja menentukan pilihan mereka dalam pasar tenaga kerja.

Kotak 1.7 Pakta Pekerjaan Global (*Global Job Pacts*)

Sebagai akibat dari krisis global keuangan, ekonomi dan pekerjaan, unsur-unsur tripartit ILO di bulan Juni 2009 menetapkan suatu Pakta Pekerjaan Global yang dirancang untuk memandu kebijakan nasional dan internasional yang ditujukan untuk merangsang pemulihan ekonomi, mempertahankan lapangan kerja yang sudah ada, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya. Pakta Pekerjaan Global memberikan serangkaian langkah penanggulangan krisis yang dapat disesuaikan dengan kekhususan kebutuhan dan situasi di masing-masing negara. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Memprioritaskan perhatian pada upaya untuk melindungi dan menumbuhkan lapangan kerja melalui usaha-usaha berkelanjutan, pelayanan umum yang berkualitas dan dengan membangun perlindungan sosial yang memadai bagi semua sebagai bagian dari aksi internasional dan nasional yang sedang berlangsung guna membantu pemulihan dan pembangunan;
2. Meningkatkan bantuan kepada perempuan dan laki-laki rentan yang tertimpa krisis dengan parah, termasuk kaum muda berisiko,

- dan tenaga kerja perekonomian informal dan tenaga kerja migran berupah rendah dan berketerampilan rendah;
3. Dipusatkannya upaya-upaya untuk mempertahankan pekerjaan yang ada dan memfasilitasi transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan juga melapangkan jalan memasuki pasar tenaga kerja bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan;
 4. Pembentukan atau penguatan pelayanan umum yang efektif di bidang penempatan tenaga kerja dan institusi-institusi lain pasar tenaga kerja;
 5. Meningkatkan kesetaraan akses dan peluang bagi pengembangan keterampilan, pelatihan dan pendidikan yang berkualitas sebagai persiapan menuju pemulihan;
 6. Menghindari solusi yang bersifat proteksionis dan konsekuensi merugikan dari deflasi spiral upah dan kondisi kerja yang memburuk;
 7. Mempromosikan standar-standar inti ketenagakerjaan dan standar-standar internasional lainnya yang mendukung pemulihan ekonomi dan pekerjaan serta mengurangi ketimpangan gender;
 8. Mengupayakan terwujudnya dialog sosial, seperti tripartisme dan perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja, sebagai proses yang bersifat konstruktif untuk memaksimalkan dampak respons krisis terhadap kebutuhan perekonomian riil;
 9. Memastikan supaya aksi jangka panjang koheren dengan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;
 10. Memastikan adanya sinergi antara negara dan pasar dan adanya peraturan yang efektif dan efisien dari peraturan perekonomian pasar, termasuk lingkungan hukum dan peraturan yang memungkinkan penciptaan usaha, terwujudnya usaha-usaha berkelanjutan dan mempromosikan penciptaan lapangan kerja di seluruh sektor; dan
 11. ILO bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional lainnya, termasuk dengan lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara maju untuk memperkuat koherensi kebijakan dan untuk memperdalam bantuan pembangunan dan bantuan bagi negara-negara yang paling kurang berkembang, yang sedang berkembang, dan negara-negara dengan ruang fiskal dan kebijakan terbatas untuk menghadapi krisis.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat: ILO: Pemulihan dari krisis: Pakta Global Pekerjaan (Jeneva, 2009)

Melampaui krisis: Menguatkan pondasi bagi pembangunan yang bersifat padat karya

Krisis global saat ini sebenarnya menggarisbawahi beberapa dari peluang dan tantangan di bidang sosial maupun ketenagakerjaan yang telah dikenali dalam laporan tahun lalu berjudul “Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia”.²⁶ Laporan tersebut juga mengungkapkan sedang munculnya sejumlah faktor lain pendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, lebih berkelanjutan dan padat karya di Indonesia. Bagian ini membahas persoalan-persoalan tersebut.

2.1 Batas minimum perlindungan sosial

Dampak krisis global di Indonesia telah menyoroti pentingnya memberikan bantuan kepada pekerja dan keluarganya melalui kebijakan perlindungan sosial yang dirancang dengan baik. Apabila bagian 1.5 mengkaji adanya kebutuhan mendesak akan jaminan pengangguran, maka bagian ini membahas aspek lain mekanisme perlindungan sosial dengan tujuan mengembangkan secara bertahap suatu batas minimum perlindungan sosial yang efektif dari waktu ke waktu. Perlindungan sosial minimum seperti itu meliputi akses yang lebih baik untuk mendapatkan peluang kerja; akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan dasar yang terjangkau, perlindungan dan pendidikan bagi anak-anak, penduduk usia lanjut dan penyandang cacat; bantuan sosial bagi penduduk miskin atau penganggur dan ciri-ciri lain yang bervariasi berdasarkan kebutuhan dan tahap pembangunan negara masing-masing.

*Membangun suatu
batas minimum
perlindungan sosial
secara bertahap*

26 Lihat ILO: Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia: Kemajuan dan Jalan menuju Pembangunan Padat Karya (Jakarta, 2008).

Perlindungan bagi mereka yang berada di perekonomian informal

Akhir-akhir ini, menggelembungnya perekonomian informal akibat krisis global menyoroti kebutuhan untuk memperluas perlindungan sosial ke perekonomian informal. Akan tetapi, kebutuhan seperti itu sebenarnya bahkan sudah ada sebelum krisis. Sebelum krisis, Indonesia sedikit cukup berhasil mengurangi porsi tenaga kerja lapangan kerja informal, terutama dalam tahun-tahun terakhir ini. Akan tetapi, sekitar 61 persen tenaga kerja yang dipekerjakan masih bekerja dalam perekonomian informal (Tabel 2.1) Antara tahun 2004 dan tahun 2008, perempuan yang bekerja dalam lapangan kerja informal berkurang jumlahnya dibandingkan laki-laki, yaitu turun sebesar 3,7 poin persentase, sementara porsi lapangan kerja informal laki-laki dalam kurun waktu yang sama hanya berkurang sebesar 1,2 poin persentase.

Tabel 2.1:
Persentase lapangan kerja informal menurut gender (persen)

	tahun	2004	2005	2006	2007	2008
Total (L+P)		63,2	63,2	62,8	62,1	61,3
Laki-laki		60,5	61,4	61,4	59,9	59,3
Perempuan		68,2	66,6	65,4	65,9	64,5

Sumber: BPS

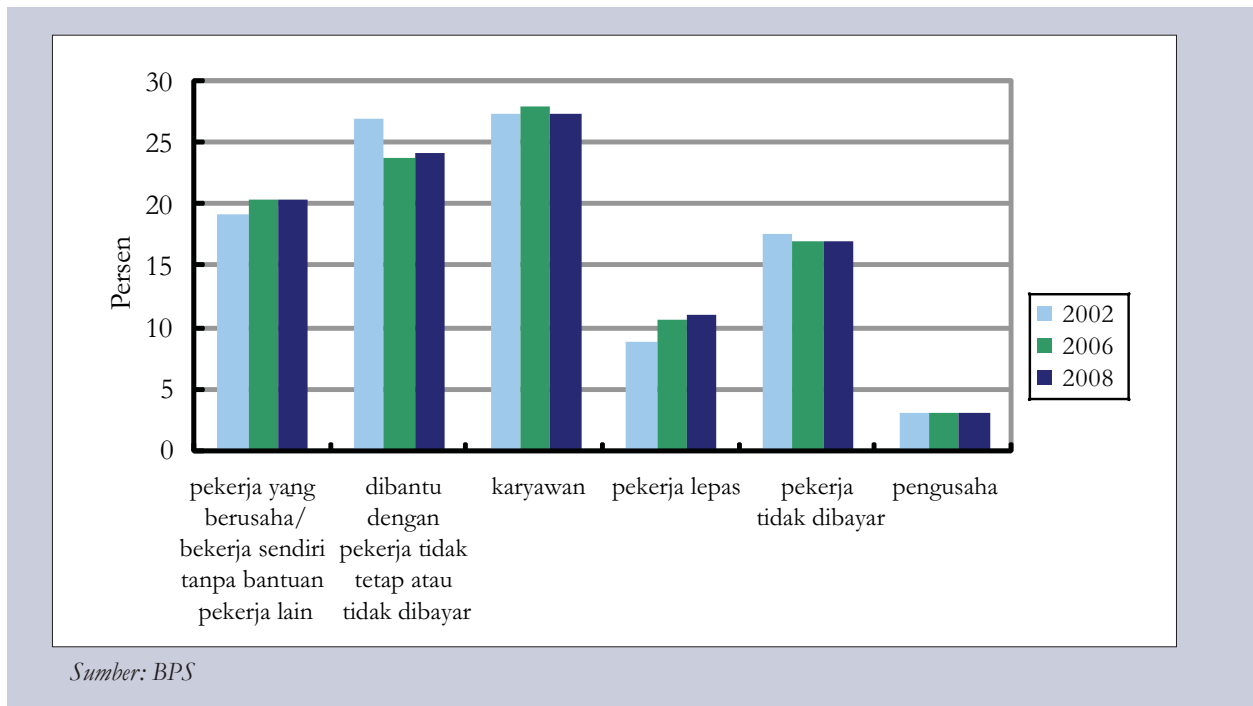
Pertumbuhan yang cepat dalam pekerjaan lepas

Yang terutama mengkhawatirkan adalah pekerja lepas yang semakin besar jumlahnya dalam angkatan kerja. Meskipun jumlah karyawan antara tahun 2002 dan tahun 2008 kurang lebih tetap sama (stabil), jumlah lapangan kerja lepas (baik di sektor non-pertanian maupun pertanian) menunjukkan kenaikan konstan (Gambar 2.1).²⁷ Meskipun jumlah lapangan kerja lepas dibandingkan total lapangan kerja masih kecil, yaitu sebesar 11,0 persen di

²⁷ Karyawan lepas didefinisikan oleh BPS sebagai orang yang bekerja non permanen bagi orang lain/pengusaha/lembaga (lebih dari 1 pengusaha selama bulan lalu) dan mendapatkan uang atau barang sebagai upah atau gaji berdasarkan sistem pembayaran harian atau kontrak. Mohon dicatat perbedaan antara istilah-istilah status pekerjaan dalam laporan ini dan istilah-istilah yang digunakan dalam survei angkatan kerja (LFS) Indonesia. Survei angkatan kerja menyebutkan kategori pekerja berikut menurut status pekerjaan: 1. Pekerja mandiri, 2. Berusaha, dibantu pekerja tidak tetap/pekerja tidak dibayar, dan 3. Berusaha, dibantu pekerja tetap. Menurut Klasifikasi Internasional Status Pekerjaan (ICSE) Tahun 1993 (lihat <http://laborsta.ilo.org/applv8/data/icsee.html#ICSE-93>), pengusaha didefinisikan sebagai orang yang mempekerjakan satu atau lebih orang lain untuk bekerja baginya dalam usahanya secara *terus-menerus*. Klasifikasi itu juga mendefinisikan karyawan sebagai pekerja yang menyandang jenis pekerjaan yang didefinisikan sebagai bekerja untuk orang lain dengan *bayaran* (huruf miring oleh pengarang). Definsi ini mengeluarkan “berusaha dibantu dengan pekerja tidak tetap/pekerja tidak dibayar” dari kategori pengusaha. Menurut ICSE-93, pekerja yang mempekerjakan dirinya sendiri/pekerja mandiri (*self-employed*) meliputi pekerja yang bekerja atas risiko sendiri (*own-account workers*), pengusaha yang berusaha, dibantu dengan pekerja keluarga tidak dibayar (*employers, contributing/unpaid family workers*), dan anggota koperasi produsen (*members of producers' cooperatives*). Apabila kategori pekerja dalam Survei Angkatan Kerja Indonesia diselaraskan dengan definisi internasional, maka akan menjadi sebagai berikut: 1. Pekerja yang bekerja atas risiko sendiri dan tidak mempekerjakan pekerja keluarga (sebagai ganti “pekerja mandiri”); 2. Pekerja yang bekerja atas risiko sendiri dengan dibantu oleh pekerja keluarga untuk sementara waktu tidak dibayar (sebagai ganti “berusaha dibantu dengan pekerja tidak tetap/ yang tidak dibayar”); dan 3. Pengusaha (sebagai ganti “berusaha dibantu dengan pekerja tetap”). Untuk menghindari kebingungan, di sepanjang laporan ini digunakan definisi yang disarankan dalam ICSE-93.

tahun 2008, angka pertumbuhan tahunan lapangan kerja lepas sebesar 8,4 persen sangatlah mengkhawatirkan. Lapangan kerja lepas non-pertanian rata-rata tumbuh sebesar 9,1 persen setiap tahun antara tahun 2004 dan tahun 2008.

Gambar 2.1
Persentase pekerjaan menurut status pekerjaan



Beberapa kemajuan telah dicapai dalam membangun suatu batas minimum perlindungan sosial di Indonesia. Kemajuan tersebut terutama tercermin dalam Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjadi titik balik dalam sejarah jaminan sosial di Indonesia. Undang-undang tersebut membenahi program-program perlindungan sosial yang ada saat ini dengan tujuan menciptakan suatu sistem jaminan sosial mencakup universal dan berupaya memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko terkait hari tua, penyakit, kecelakaan kerja dan kematian. Akan tetapi, undang-undang tersebut masih menunggu penjabaran dan penerapan dalam peraturan pelaksanaan sebelum dapat dilaksanakan. Pelaksanaan undang-undang tersebut, khususnya bagi pekerja dalam perekonomian informal, jika digandengkan dengan unsur-unsur lain dari batas minimum perlindungan sosial, termasuk program-program bantuan sosial bagi kelompok penduduk rentan, pendekatan padat karya bagi pembangunan infrastruktur dan jaminan pengangguran dan/atau skema jaminan lapangan kerja akan memainkan peran vital dalam memberikan jaminan ulang yang dibutuhkan bagi inovasi dan pondasi pertumbuhan produktivitas di Indonesia.

Kotak 2.1

Jaminan Sosial yang Fleksibel (Jamsosflek)

Perdebatan mengenai keseimbangan antara jaminan sosial dan fleksibilitas mempunyai sejarah panjang, dan pandangan yang umum dianut orang berayun-ayun di antara pandangan ‘institusionalis’ dan pandangan ‘(neo-) liberalis’. Pandangan yang pertama menekankan peran negara dan mitra sosial dalam mengoreksi kegagalan pasar, sedangkan yang terkemudian menggarisbawahi mekanisme pasar. Negara-negara kesejahteraan (*welfare states*) pasca perang dibangun di atas pandangan yang pertama dan mengembangkan institusi pasar tenaga kerja. Korporatisme mendukung fungsi negara kesejahteraan. Karena model negara kesejahteraan [sistem sosial berprinsip negara memikul tanggung jawab utama atas kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial warga negaranya] tersandung oleh tingginya pengangguran dan meningkatnya pengeluaran publik setelah dua krisis minyak, neo-liberalisme secara bertahap mendominasi ideologi ekonomi arus utama. Sesungguhnya, Studi Pekerjaan dari OECD dimotivasi oleh keyakinan bahwa kekakuan pasar tenaga kerja mengurangi kinerja pasar tenaga kerja. Deregulasi pasar tenaga kerja menjadi garis kebijakan yang populer. Kinerja yang kuat dari perekonomian Amerika Serikat sering kali digunakan sebagai bukti dalam mengadvokasikan ketergantungan yang lebih besar pada mekanisme pasar. Setelah perdebatan satu dasawarsa ihwal peraturan perundang-undangan perlindungan lapangan kerja, para peneliti — termasuk OECD sendiri — sampai pada kesimpulan bahwa kekakuan pasar tenaga kerja sedikit hubungannya dengan pengangguran secara keseluruhan.

Jamsosflek (*flexicurity*) adalah konsep yang mempromosikan keseimbangan optimal di antara dua tuntutan: jaminan bagi pekerja terhadap berbagai risiko pasar tenaga kerja dan fleksibilitas pasar tenaga kerja yang menumbuhkembangkan lingkungan usaha yang kondusif. Pertanyaannya adalah, di mana letak keseimbangannya. ILO, Uni Eropa dan kalangan akademisi sudah memprakarsai penelitian mengenai keseimbangan tersebut. Temuan-temuan hasil penelitian secara aklamasi menunjukkan bahwa dialog sosial yang konstruktif dapat mencari keseimbangan optimal antara jaminan dan fleksibilitas dalam pasar tenaga kerja karena keseimbangan bersifat spesifik untuk masing-masing negara, tergantung pada institusi pasar tenaga kerja yang ada, ketentuan pajak, dan faktor-faktor lainnya. Pada kenyataannya, hubungan industrial yang kooperatif dan cakupan perundingan bersama yang lebih tinggi bersifat kondusif bagi jamsosflek. Negara-negara Eropa bertujuan mengkombinasikan jaminan sosial dan kebijakan aktif pasar tenaga kerja (misalnya melalui pelayanan penempatan tenaga kerja dan pelatihan) dengan pasar tenaga kerja yang dinamis, yang melibatkan pergeseran dari perlindungan terhadap pekerjaan ke perlindungan terhadap pasar tenaga kerja yang lebih mengandalkan daya pikul yang lebih besar dari

masyarakat. Denmark dan Belanda sering kali disebut sebagai negara model untuk jamsosflek.

Sumber: P. Auer dan K. Chatani: "Negotiating flexicurity" dalam S. Hayter, ed.: *Negotiating for Sosial Justice* (ILO, akan dipublikasikan).

Kotak 2.2

Perlindungan sosial di Indonesia: Selayang pandang²⁸

Dana jaminan sosial tenaga kerja (*Jamsostek*), diluncurkan tahun 1992, mencakup risiko hari tua, kecelakaan kerja (cacat dan cedera akibat kerja), sakit-penyakit, dan kematian.²⁹ Skema ini dimaksudkan untuk melindungi karyawan di perusahaan dengan lebih dari 10 karyawan atau pengupahan di atas Rp. 1 juta di sektor swasta. Meskipun demikian, hanya sedikit proporsi tenaga kerja dalam perekonomian formal yang mendapat perlindungan jamsostek. Jaminan serupa tetapi bersifat wajib juga diberlakukan bagi pegawai sektor publik (*Taspen*) dan polisi dan personil angkatan bersenjata (*Asabri*).

Berbagai program bantuan sosial juga ada di Indonesia. Program Keluarga Harapan (*PKH*) diperuntukkan bagi keluarga miskin yang sedang menunggu kelahiran seorang anak atau sudah mempunyai anak berusia hingga 15 tahun. Program ini memberikan bantuan tunai bersyarat, mengharuskan dipenuhinya 12 syarat kesehatan dan pendidikan termasuk sekurang-kurangnya empat pemeriksaan kesehatan selama kehamilan dan 85 persen kehadiran di bangku sekolah per tahun. Keluarga penerima manfaat program ini menerima transfer uang sebesar antara Rp. 0,6 juta hingga 2,2 juta per tahun, tergantung usia dan jumlah anak. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (*PNPM*) merupakan program lain pengentasan kemiskinan, lebih ditujukan kepada masyarakat miskin ketimbang rumah tangga miskin. Program ini mencakup 3,999 kecamatan dan 47,954 desa pada tahun 2008. Dengan adanya perluasan program di tahun 2009, program ini diperkirakan akan memberikan manfaat bagi 8 hingga 9 juta orang dan menyerap 3 hingga 4 juta tenaga kerja.³⁰ Sementara itu, Asuransi Kesehatan bagi Keluarga Miskin (*Askeskin*) memberikan kepada lebih dari 36 juta penduduk miskin pengobatan gratis, sedangkan Bantuan Operasional Sekolah (*BOS*) memberikan subsidi kepada siswa SD dan SMP.

28 Lihat GTZ: *Options for Sosial Protection Reform di Indonesia* (Jakarta, 2008) untuk garis besar lengkap sistem perlindungan sosial di Indonesia.

29 Untuk rincian lebih lanjut, lihat : Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.

30 http://www.mediaindonesia.com/read/2009/03/03/64673/4/2/Peningkatan_PNPM_Menggembirakan

Kotak 2.3

Penduduk miskin yang bekerja di Indonesia³¹

Sejumlah besar pekerja berhasil mengangkat diri mereka sendiri dan keluarganya dari lembah kemiskinan dalam dasawarsa terakhir. Pada tahun 1999, terdapat 41,2 persen tenaga kerja hidup di bawah garis kemiskinan Rp. 12.500 per hari; pada tahun 2007, angka itu telah turun menjadi 22,4 persen.

Penduduk miskin yang bekerja terkonsentrasi di daerah pedesaan dan di sektor pertanian (Tabel 2.2). Jumlah terbanyak penduduk miskin bekerja dijumpai di kalangan tenaga kerja lepas (Gambar 2.2).

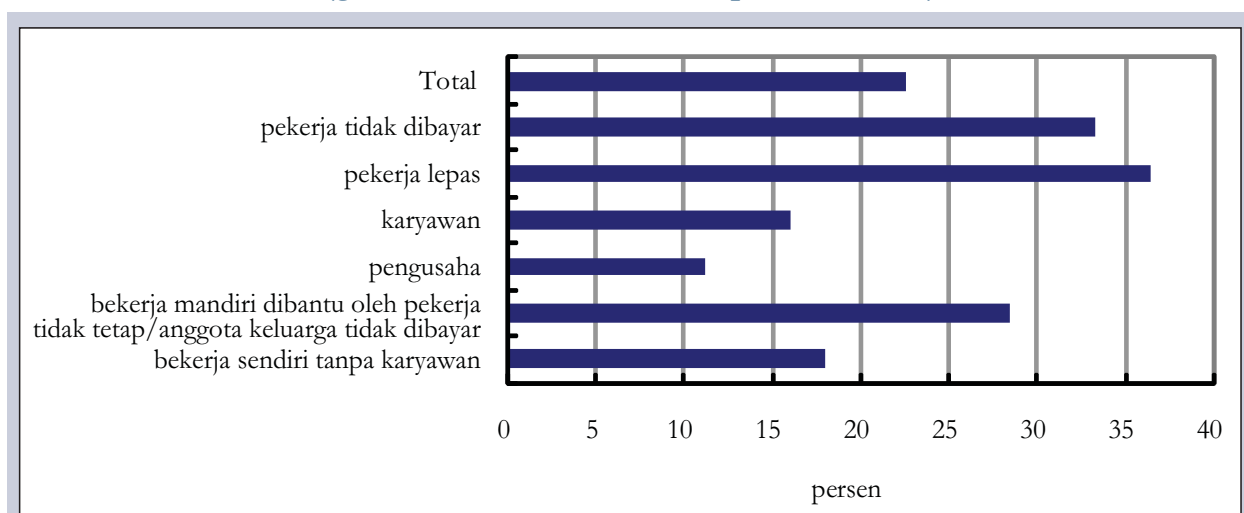
Tabel 2.2:
Distribusi penduduk miskin bekerja berdasarkan sektor, daerah geografi dan gender (2007, %)

	Kota	Desa	Pria	Female	TOTAL
Pertanian	5,2	60,3	39,3	26,2	65,5
Industri	4,1	9,1	8,8	4,4	13,3
Jasa	8,5	12,7	12,8	8,4	21,2
TOTAL	17,9	82,1	60,9	39,1	100

Sumber: BPS, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*

Catatan: [Batas] garis kemiskinan: berpenghasilan USD 1,25 per hari

Gambar 2.2
Penduduk miskin bekerja menurut status pekerjaan
(garis kemiskinan: USD 1,25 per hari, 2007)



Sumber: BPS, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*

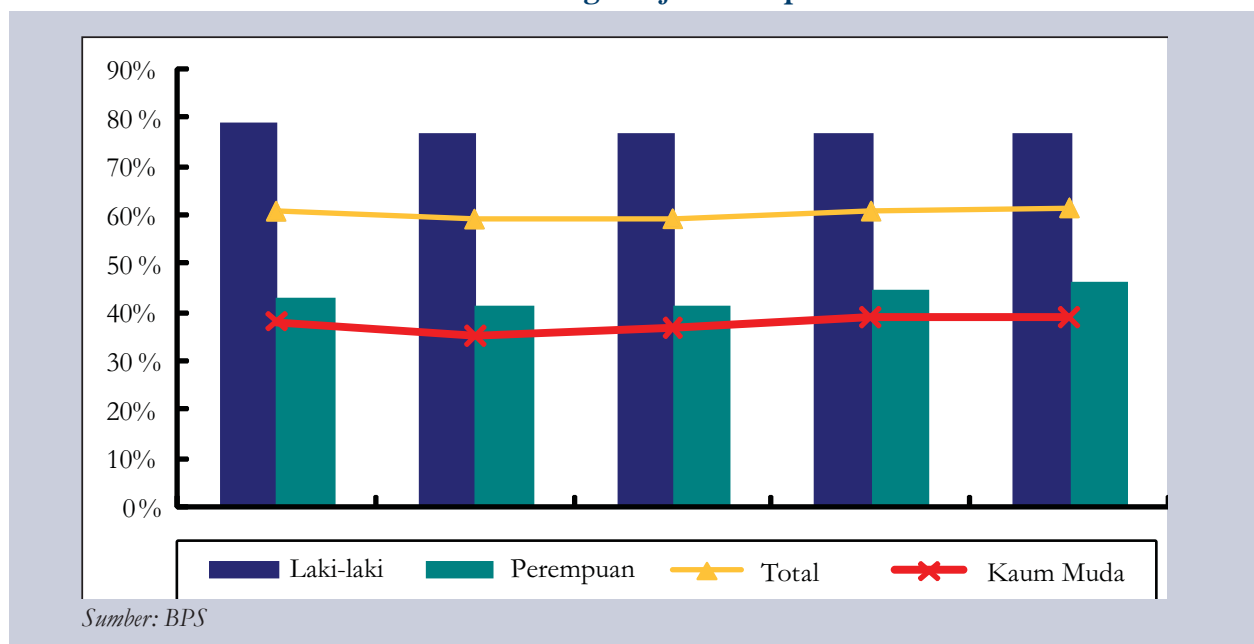
31 Penduduk miskin yang bekerja didefinisikan sebagai orang yang bekerja tetapi masih hidup dalam rumah tangga yang anggota-anggotanya diperkirakan berada di bawah garis kemiskinan. Lihat ILO: *Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja (KILM)*, Edisi Kelima (Jenewa, 2007).

2.2 Pergeseran struktural dalam lapangan kerja

Kondisi ekonomi yang kondusif memicu pertumbuhan lapangan kerja antara tahun 2004 dan tahun 2008. Selama kurun waktu ini, pertumbuhan lapangan kerja (total 9,4; laki-laki 5,5 dan perempuan 16,6 persen) melampaui pertumbuhan angkatan kerja (total 7,7; laki-laki 4,9 dan perempuan 12,5 persen), menciptakan ruang untuk menyerap tenaga yang baru memasuki pasar tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran terbuka (Lampiran II).³² Dalam tahun-tahun terakhir ini juga terlihat keberhasilan penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja muda (usia 15 hingga 24 tahun). Angka pengangguran di kalangan tenaga kerja muda mencatat penurunan tajam antara tahun 2004 dan tahun 2008, dari 29,6 persen ke 23,3 persen (laki-laki 26,9 ke 21,8, perempuan 33,5 ke 25,5). Keberhasilan ini sebagian disebabkan oleh kenaikan tingkat partisipasi dalam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.³³ Seandainya tingkat partisipasi tenaga kerja pada tahun 2008 sama seperti pada tahun 2004, maka penurunan angka pengangguran tenaga kerja muda akan sedang-sedang saja.³⁴ Secara keseluruhan, rasio lapangan kerja tenaga kerja muda terhadap penduduk sebagian besar tetap stabil (Gambar 2.3).

Lapangan kerja terdongkrak oleh pertumbuhan ekonomi

Gambar 2.3
Rasio Ketenagakerjaan - Populasi



32 Pengangguran hanya mewakili satu aspek kinerja pasar tenaga kerja. Perhatian hendaknya diberikan pada upaya untuk mengatasi berbagai kelemahan pasar tenaga kerja (seperti jam kerja yang panjang, rendahnya partisipasi tenaga kerja perempuan, tingginya angka setengah pengangguran, besarnya porsi lapangan kerja informal dari total lapangan kerja yang ada). Lihat I. Islam dan A. Chowdhury: "Enunciating a national employment strategy for Indonesia – what do we know dan what should we do?" Kertas Kerja ILO Jakarta (Jakarta, 2008).

33 Lihat ILO: *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia: Kemajuan dan Jalan menuju Pembangunan Padat Karya* (Jakarta, 2008).

34 Bila diasumsikan angka partisipasi tenaga kerja yang sama di tahun 2004 dan 2008, angka pengangguran tenaga kerja muda di tahun 2008 akan menjadi sebagai berikut: total laki-laki dan perempuan 27,9, laki-laki 26,9 dan perempuan 30,0 persen.

*Sektor jasa telah
mendorong
pertumbuhan
ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam tahun-tahun sebelum krisis ekonomi global terutama didorong oleh sektor jasa (Tabel 2.3). Misalnya, sektor komunikasi mencatat ekspansi yang luar biasa dengan tingkat ekspansi dihitung berdasarkan pertumbuhan setahun penuh sebesar 27,6 persen antara tahun 2004 dan tahun 2008, terutama disebabkan oleh menyebarnya telepon seluler. Usaha sektor jasa menikmati tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata yang tinggi sebesar 9,0 persen. Sektor pertanian dan industri pengolahan tetap penting, memberikan kontribusi sebesar 42,3 persen dari PDB; akan tetapi, tingkat pertumbuhannya dalam kurun waktu lima tahun terakhir lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan rata-rata seluruh sektor.

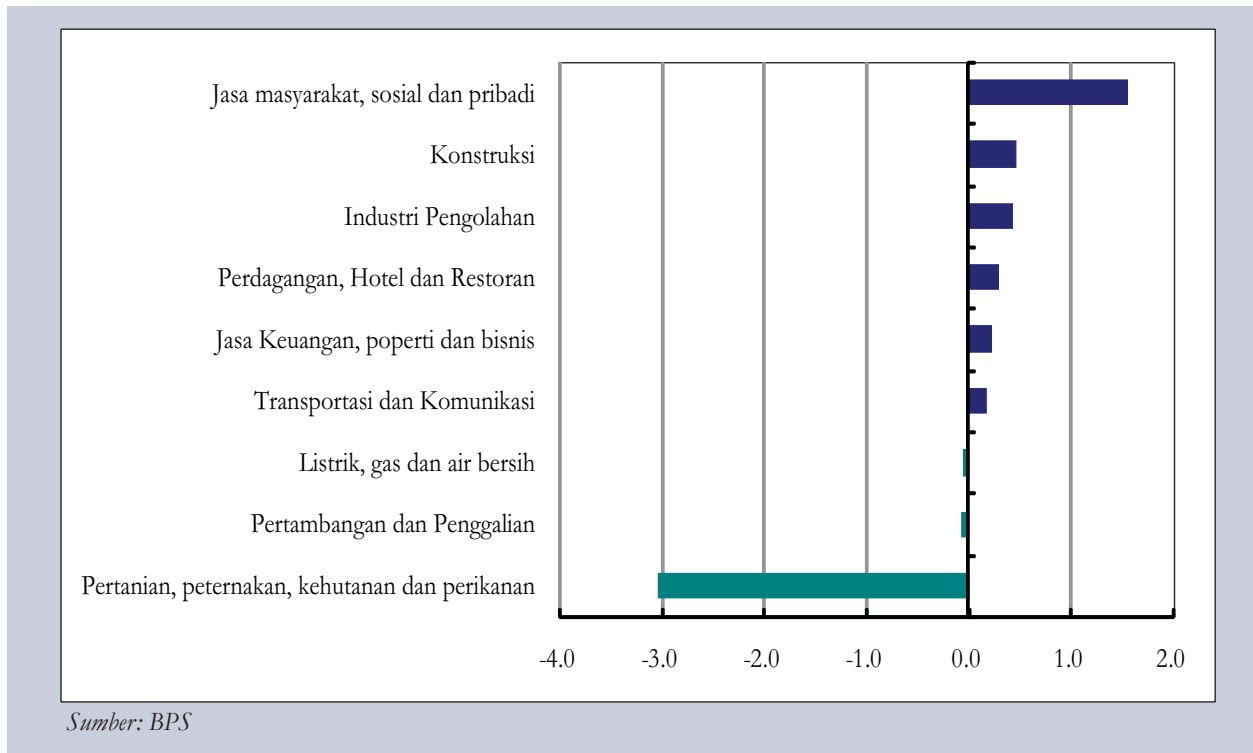
Tabel 2.3:
Angka pertumbuhan & persentasenya terhadap PDB menurut sektor

	angka pertumbuhan tahunan (2004–2008, %)	Persentasenya terhadap PDB (2008, %)
Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi	14,4	6,3
Listrik, Gas & Air	8,3	0,8
Bangunan	7,9	8,5
Perdagangan, Restoran dan Hotel	7,6	14,0
Keuangan, Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa	7,1	7,4
Seluruh sektor kecuali migas	6,5	89,4
Jasa	6,1	9,8
Seluruh sektor	5,9	100,0
Industri pengolahan	4,4	27,9
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	3,6	14,4
Pertambangan dan Penggalian	1,9	11,0
<i>Sumber: BPS</i>		

*Lapangan kerja
sektor jasa sekarang
memiliki persentase
paling besar*

Dengan pertumbuhan yang kuat di sektor jasa dalam tahun-tahun terakhir ini, mayoritas penduduk Indonesia sekarang bekerja di sektor ini. Gambar 2.4 mengilustrasikan pergeseran sektoral ini dalam lapangan kerja. Persentase lapangan kerja di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dari total lapangan kerja turun sebesar tiga poin persentase antara tahun 2004 dan tahun 2008. Sektor jasa, terutama sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan; sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri pengolahan, di sisi lain, meningkatkan pangsa masing-masing dari total lapangan kerja.

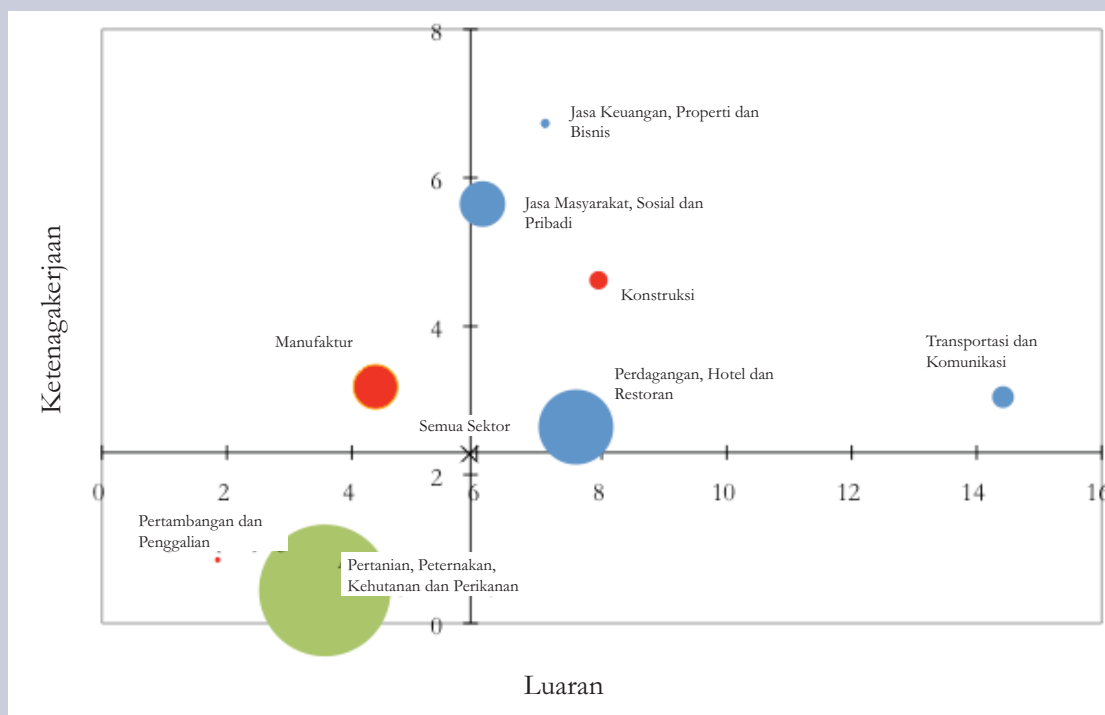
Gambar 2.4
Perubahan dalam total lapangan pekerjaan



Akan tetapi, di sektor jasa, intensitas pertumbuhan output lapangan kerja beraneka ragam (Gambar 2.5). Angka pertumbuhan lapangan kerja tahunan selama kurun waktu antara tahun 2004 dan tahun 2008 tercatat paling tinggi di sektor keuangan, persewaan bangunan, tanah dan jasa (6,7 persen), diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan (5,6 persen). Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja di sektor transportasi dan komunikasi sedang-sedang saja sekalipun pertumbuhan output sektor ini sangat mengagumkan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran juga tidak mengalami intensitas output yang tinggi dari pertumbuhan tenaga kerja.

Gambar 2.5

Output dan pertumbuhan lapangan pekerjaan tahun (dari tahun 2004 hingga tahun 2008, dinyatakan dalam persentase %)



Sumber: BPS

Kotak 2.4

Pendekatan sektoral terhadap lapangan kerja

Sejumlah negara di seluruh dunia, termasuk negara berkembang maupun sedang berkembang, menggunakan pendekatan sektoral terhadap pengembangan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja. Menganut pendekatan seperti itu telah terbukti membawa berbagai keunggulan:

- Para pembuat kebijakan dapat memfokuskan sumber daya yang ada pada sektor-sektor prioritas dengan cara yang efektif dari segi biaya dan dengan cara yang strategis;
- Pendekatan tersebut menciptakan suatu neksus organik [hubungan yang bersifat membentuk satu kesatuan] antara strategi perdagangan dan investasi di satu sisi dan strategi pengembangan keterampilan dan lapangan kerja di sisi lain, sehingga menciptakan sinergi di antara kebijakan-kebijakan publik;
- Para pemangku kepentingan dapat menjalin kerja sama untuk mengembangkan suatu visi bagi sektor masing-masing, termasuk identifikasi peran masing-masing dalam proses tersebut;
- Adanya kesamaan visi di antara sektor-sektor tersebut membantu mitra sosial dan otoritas publik untuk mengantisipasi permintaan tenaga terampil dalam waktu dekat, yang antara lain mendorong

perencanaan pengembangan keterampilan yang tepat serta komitmen untuk melakukan investasi dalam keterampilan dan kemampuan pekerja, antara lain melalui pembelajaran seumur hidup.

Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa pendekatan sektoral terhadap lapangan kerja menyingkirkan kendala pertumbuhan dan memicu ekspansi sektoral yang lebih cepat, meningkatkan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

Sumber: M. Powell dan R. Damayanti: "Pendekatan sektoral terhadap lapangan kerja: Pelajaran dan rekomendasi bagi Indonesia" (ILO, Jakarta, akan diterbitkan).

Pergeseran struktural dalam lapangan kerja menjauh dari pertanian ke pelayanan-pelayanan dengan nilai tambah lebih tinggi dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menaikkan taraf kehidupan dan mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini, upaya untuk memudahkan mobilitas tenaga kerja dari satu sektor ke sektor yang lain hendaknya menjadi prioritas kebijakan. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan investasi di sektor pertanian dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian. Pengeluaran pemerintah untuk subsidi energi di Indonesia kira-kira enam kali lebih besar daripada investasi publik dalam pertanian, dan dengan demikian mengindikasikan adanya ruang lingkup bagi pengalokasian kembali investasi yang dapat mempromosikan produktivitas pertanian dan perubahan struktural yang bermanfaat.³⁵ Pada saat yang sama, sekalipun kenaikan investasi di pertanian mendorong peningkatan produktivitas sehingga membebaskan lebih banyak tenaga kerja sektor pertanian, perubahan struktural tidak akan terjadi kecuali terdapat peluang kerja dalam industri dengan produktivitas yang tinggi. Dengan demikian, kebijakan untuk menyalurkan tabungan dalam negeri dan menarik investasi ke dalam industri yang berpotensi tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja juga dibutuhkan. Selain itu, perubahan struktural seperti itu hanya dapat terjadi apabila tenaga kerja dibekali dengan keterampilan yang relevan untuk berpindah dari sektor yang satu ke sektor lainnya, yang nanti akan dibahas.

Investasi di sektor pertanian dan pertumbuhan diperlukan untuk mendorong perubahan struktural dan pertumbuhan produktivitas

35 "Fuel subsidies overseas take a toll on US", the New York Times, 28 Juli 2008.

2.3 Memperbaiki kualitas angkatan kerja

Pengembangan keterampilan sangat menentukan di dalam mendukung pergeseran struktural

Tatkala komposisi sektoral lapangan kerja berubah, keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja dengan sendirinya ikut bergeser seiring dengan perubahan tersebut. Misalnya, tumbuhnya sektor jasa menuntut serangkaian keterampilan tertentu seperti keterampilan menggunakan komputer dan pola pikir yang berorientasi pada pelanggan. Selain itu, sebagai perekonomian berpendapatan menengah, Indonesia sedang mengalami hilangnya keunggulan biaya tenaga kerja, dan industri sedang memerlukan angkatan kerja yang kian terampil untuk menjalankan produksi yang lebih padat modal dan bernilai tambah.³⁶ Pemadanan keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan industri-industri ini telah muncul sebagai peluang sekaligus tantangan dalam pasar tenaga kerja. Dalam hal ini, sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan memainkan peran penting dalam menyiapkan angkatan kerja supaya dapat dengan efektif melakukan penyesuaian terhadap pergeseran struktural, perubahan teknologi dan situasi ekonomi yang berubah-ubah.

Dibutuhkan fokus pada upaya agar anak tetap bersekolah, fokus pada sekolah menengah dan seterusnya

Kemajuan yang signifikan telah diperoleh dalam melapangkan jalan untuk memasuki pendidikan dasar (Tabel 2.4), dengan angka partisipasi murni dasar saat ini melebihi 95 persen. Akan tetapi, terdapat banyak ruang guna memastikan agar anak-anak tetap bertahan di sekolah dasar dan kemudian beranjak ke sekolah menengah. Di samping itu, angka partisipasi murni pendidikan menengah hanya sekitar 59 persen. Ini menimbulkan kekhawatiran karena pada titik dalam sistem pendidikan inilah tenaga kerja muda dapat memperoleh keterampilan, pelatihan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja yang menuju lapangan kerja berbasis jasa.³⁷ Pendidikan tinggi juga bersifat menentukan dalam memastikan tenaga kerja berketerampilan tinggi dan terspesialisasi yang dibutuhkan perekonomian berbasis pengetahuan. Akan tetapi, di Indonesia, hanya 6,5 persen yang berhasil mencapai suatu tingkat pendidikan tinggi. Angka ini rendah apabila dibandingkan dengan Thailand (14,2 persen) dan Republik Korea (33,6 persen).³⁸

³⁶ Misalnya, biaya tenaga kerja per jam di sektor garmen: Indonesia USD 0.50, Vietnam USD 0.38, Pakistan USD 0.37 dan Kamboja USD 0.33. Sumber: The Jakarta Post "Radical changes needed in RI garment industry", 06 Mei 2009.

³⁷ ILO: *Tren ketenagakerjaan dan sosial di ASEAN tahun 2008: Mendorong Daya Saing dan Kemakmuran dengan Pekerjaan yang Layak* (ILO, Bangkok, 2008).

³⁸ *Ibid.*

Tabel 2.4:
Indikator kunci pendidikan (persentase)

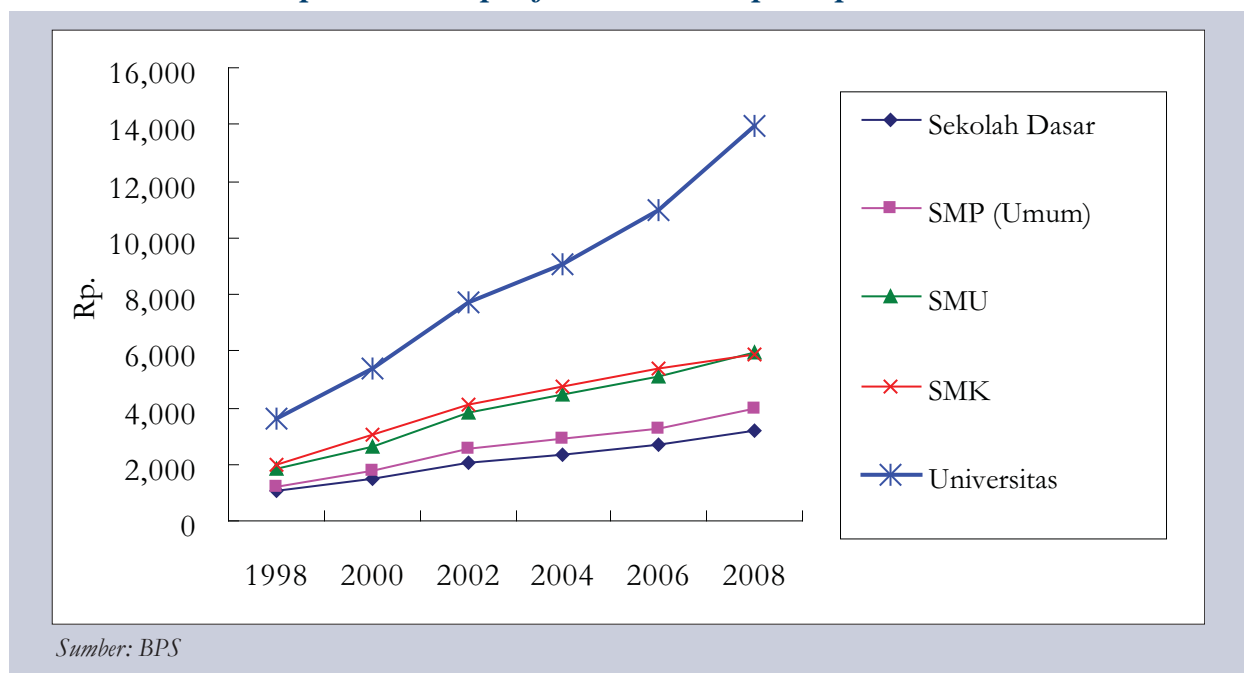
Angka partisipasi murni, pendidikan dasar (2006)	Persentase anak yang bertahan sekolah hingga kelas 5 (2005)	Peralihan dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah rendah (2005)	Angka partisipasi murni, pendidikan menengah (2006)	Partisipasi kejuruan teknik sebagai persentase dari partisipasi di tingkat pendidikan menengah (2005)
95,5	84,4	88,5	59,0	13,6

Sumber: Institut Statistik UNESCO

Capaian pendidikan menjadi lebih penting tatkala jumlah penduduk yang kembali menempuh pendidikan mengalami peningkatan. Ini dibuktikan dengan semakin melebarnya kesenjangan upah rata-rata per jam antara pekerja berpendidikan dasar dan pekerja penyandang gelar universitas (Gambar 2.5). Rasio upah antara kedua kategori pekerja tersebut adalah 1 berbanding 3,5 di tahun 1998; rasio tersebut mencapai 4,4 di tahun 2008. Tren seperti itu dapat memberikan insentif yang kuat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, tetapi juga dapat menjadi suatu potensi ancaman bagi kohesi sosial apabila kesenjangan pendapatan kian melebar.

Meningkatnya jumlah siswa yang kembali menempuh pendidikan

Gambar 2.6
Upah nominal per jam menurut capaian pendidikan



*Pendidikan
berkualitas juga
adalah kunci*

Meskipun meningkatkan capaian pendidikan di semua tingkatan adalah penting, namun juga tidak kalah pentingnya adalah perbaikan mutu pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini, sebagaimana disoroti dalam laporan tahun lalu, sejumlah besar siswa Indonesia mungkin tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka kelak sebagai orang dewasa dan bagi pasar tenaga kerja.³⁹ Di antara mereka yang mendaftar untuk mengikuti pendidikan menengah di Indonesia, sekitar 14 persen diperkirakan mengikuti pelatihan teknis dan kejuruan. Akan tetapi, sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan juga menghadapi masalah kurikulum yang tidak efektif, lemahnya kapasitas, kurangnya jumlah instruktur pelatihan yang memenuhi syarat, peralatan pelatihan yang sudah ketinggalan jaman dan tidak memadainya hubungan antara penyelenggara pelatihan dan permintaan sektor swasta akan tenaga kerja terampil.⁴⁰ Akibat lemahnya standar kompetensi dan tidak memadainya kerangka kualifikasi nasional di Indonesia, pengusaha merasa kesulitan menilai kompetensi dan tingkat keterampilan pencari kerja. Pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif dengan didukung oleh sistem informasi pasar tenaga kerja yang modern dan efisien juga akan mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam memadankan keterampilan pekerja dengan lowongan kerja yang ada.

Melalui kerja sama antara pemerintah, mitra sosial, lembaga pendidikan dan penyelenggara pelatihan, terbentuk ruang bagi dukungan lebih lanjut terhadap sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan Indonesia.

2.4 Memastikan kesetaraan gender

*Meningkatnya
capaian pendidikan
di antara perempuan
muda*

Salah satu perkembangan mencolok lima tahun terakhir ini di pasar tenaga kerja Indonesia adalah kemajuan yang signifikan menuju kesetaraan gender dari segi partisipasi angkatan kerja, lapangan kerja dan upah. Secara keseluruhan, tingkat capaian pendidikan angkatan kerja Indonesia secara bertahap mengalami kenaikan. Namun, perbaikan paling mencolok terjadi dalam angkatan kerja perempuan muda (Tabel 2.5). Di samping itu, walaupun angkatan kerja laki-laki memiliki pendidikan yang sedikit lebih baik daripada angkatan kerja perempuan apabila tingkat pendidikan seluruh kelompok usia dibandingkan, tenaga kerja perempuan berusia duapuluhan mempunyai pendidikan yang lebih baik daripada tenaga kerja laki-laki dalam kelompok usia yang sama.⁴¹ Pada tahun 2008, 16,1 persen pekerja perempuan dalam

39 Untuk diskusi mengenai hasil-hasil pembelajaran di Indonesia berdasarkan survei *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan *Organization bagi Ekonomi Cooperation dan Development (OECD)*, Lihat ILO: *Tren ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2008: Kemajuan dan Jalan menuju Pembangunan Padat Karya* (Jakarta, 2008).

40 ILO: *Tren ketenagakerjaan dan sosial di ASEAN tahun 2008: Mendorong Daya Saing dan Kemakmuran dengan Pekerjaan yang Layak* (ILO, Bangkok, 2008).

41 30,6 persen angkatan kerja laki-laki mempunyai pendidikan sekolah menengah atau di atasnya di tahun 2008, sedangkan 27,6 persen angkatan kerja perempuan mempunyai sekurang-kurangnya pendidikan sekolah menengah.

kelompok usia 25–29 mempunyai pendidikan akademi atau di atasnya. Di sisi lain, hanya 8,3 persen pekerja laki-laki mencapai tingkat pendidikan tersebut. Kesenjangan ini melebar dalam kurun waktu antara tahun 2004 dan tahun 2008, yaitu dari 3,9 poin persentase menjadi 7,8 poin persentase.

Tabel 2.5:
Persentase angkatan kerja menurut kelompok umur dan capaian pendidikan (usia 15+)

	SMP atau di bawahnya		SMU		SMK		Diploma/ akademi		Universitas	
	2004	2008	2004	2008	2004	2008	2004	2008	2004	2008
Laki-laki										
20-24	61,7%	57,6%	22,8%	24,6%	13,1%	13,8%	1,5%	2,3%	0,9%	1,7%
25-29	63,2%	60,1%	20,2%	19,9%	10,2%	11,7%	2,5%	3,2%	3,9%	5,1%
Total	72,4%	69,4%	14,8%	16,2%	7,5%	8,2%	2,2%	2,2%	3,2%	4,1%
Perempuan										
20-24	56,9%	49,9%	24,4%	27,5%	12,4%	11,9%	3,9%	6,7%	2,4%	4,0%
25-29	65,1%	57,6%	16,5%	17,9%	8,0%	8,3%	4,5%	7,1%	5,8%	9,0%
Age total	80,0%	72,4%	10,8%	13,2%	5,9%	5,9%	2,8%	4,1%	0,6%	4,5%

Sumber: BPS, perhitungan pengarang

Kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja juga menyempit sebesar 4,4 poin persentase antara tahun 2004 dan tahun 2008 (Tabel 2.6). Lapangan kerja perempuan tumbuh sebesar 16,6 persen antara 2004 dan 2008 (dengan kata lain, terjadi kenaikan bersih sebesar 5,5 juta pekerjaan). Kuatnya pertumbuhan lapangan kerja perempuan ini seiring dengan perubahan mencolok dalam distribusi lapangan kerja perempuan menurut status. Meskipun persentase pekerja keluarga tidak dibayar turun dari 38,5 persen di tahun 2004 menjadi 32,1 persen di tahun 2008 (atau terjadi penurunan jumlah pekerja keluarga tidak dibayar sebesar 341,000), persentase pekerja mandiri dan karyawan meningkat dari 16,5 persen menjadi 19,1 persen (atau terjadi kenaikan bersih dalam jumlah pekerja mandiri sebanyak 1.921.000 orang), dan dari 23,6 ke 25,1 persen (atau terjadi kenaikan bersih jumlah karyawan sebanyak 1.869.000 orang). Pertumbuhan di sektor jasa dan kemajuan dalam capaian pendidikan perempuan antara lain ikut memberikan kontribusi bagi melonjaknya pertumbuhan lapangan kerja di kalangan perempuan.

*Mempersempit
kesenjangan gender*

Tabel 2.6:
Angka partisipasi angkatan kerja

	2004	2005	2006	2007	2008
Total (L+P)	67.5	66.8	66.2	67.0	67.2
Laki-laki (L)	86.0	84.9	84.2	83.7	83.5
Perempuan (P)	49.2	48.4	48.1	50.2	51.1

Sumber: BPS

Di samping itu, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan mengalami penyempitan luar biasa antara tahun 2004 dan tahun 2008. Upah per jam yang diterima perempuan sebagai persentase upah per jam yang diterima laki-laki merambat naik dari 77,8 persen di tahun 2004 menjadi 82,8 persen di tahun 2008. Tren positif ini dapat dilihat di seluruh kelompok pekerjaan kecuali di kalangan profesional, pekerja teknik dan pekerja terkait lainnya karena di kalangan tersebut kesenjangan upah laki-laki dan perempuan justru melebar sebesar 5,4 poin persentase (Tabel 2.7).⁴² Patut dicatat bahwa kesenjangan upah tersebut bersifat terbalik untuk pekerjaan administrasi dan pekerjaan manajerial: rata-rata perempuan berpenghasilan 8,9 persen lebih tinggi daripada laki-laki pada tahun 2008. Di sisi lain, harus dicatat bahwa hanya 0,46 persen pekerja perempuan yang berhasil mendaki tangga menuju jabatan manajemen, sedangkan laki-laki 1,2 persen.⁴³

Tabel 2.7:
Upah perempuan sebagai persentase dari upah laki-laki menurut jenis pekerjaan

	2004	2008
Pekerja profesional, teknik dan pekerja terkait lainnya	84,5	79,1
Pekerja administrasi dan manajerial	79,7	108,9
Pekerja juru tulis dan terkait	81,1	87,3
Pekerja penjualan	67,4	69,9
Pekerja jasa	46,3	48,7
Pekerja pertanian	68,8	76,3
Pekerja produksi, operator dan buruh	74,3	76
Pekerjaan total	77,8	82,8

Sumber: BPS, perhitungan pengarang

Kemajuan yang signifikan dalam kesetaraan gender ini telah tercapai di Indonesia; akan tetapi, dibutuhkan dukungan berkelanjutan guna memastikan bahwa perempuan mempunyai peluang yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, dan dapat dengan lebih baik memasuki pasar tenaga kerja dan memetik manfaat dari pekerjaan mereka, dan mempunyai sarana yang lebih baik bagi pengembangan karir. Kemajuan di bidang gender juga merupakan sarana penting untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Milenium.

42 Selama kurun waktu lima tahun ini, jumlah perempuan yang bekerja dalam kategori pekerjaan ini naik sebesar 57.1 ribu. Kenaikan tajam persentase perempuan dalam kelompok pekerjaan ini dapat mempengaruhi melebarnya kesenjangan upah.

43 Sumber: Perhitungan pengarang didasarkan pada Data BPS.

Kotak 2.5**MDG Target 1b: Pemenuhan lapangan kerja, pekerjaan produktif dan pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki**

Kedelapan Sasaran Pembangunan Milenium (MDG) berasal dari Deklarasi Milenium yang ditetapkan oleh 189 bangsa dalam Pertemuan Puncak Milenium PBB di bulan September 2000. Kedelapan sasaran itu terdiri dari 21 target yang dapat diukur, dan kemajuan dimonitor oleh 60 indikator yang dapat diukur. Target 1b dalam Sasaran 1 untuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan ekstrem menantang negara untuk mencapai pemenuhan lapangan kerja, pekerjaan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua, termasuk perempuan dan kaum muda. Empat indikator berikut digunakan untuk menilai kemajuan menuju pencapaian target.

- Angka pertumbuhan dalam PDB per tenaga yang dipekerjakan;
- Rasio lapangan kerja terhadap populasi;
- Proporsi penduduk bekerja dengan penghasilan di bawah USD 1 (PPP) per hari;
- Proporsi penduduk yang bekerja sendiri dan pekerja keluarga tidak dibayar dibandingkan total lapangan kerja.

Sebagaimana diindikasikan dalam Tabel 2.8, perempuan menghadapi tantangan-tantangan khusus: mereka mempunyai kemungkinan lebih kecil untuk mempunyai pekerjaan dan walaupun bekerja, lebih besar kemungkinannya untuk kehilangan pekerjaan daripada laki-laki.

Tabel 2.8:
Target 1b Sasaran Pembangunan Milenium

Indikator	Tahun	Jenis Kelamin	
Angka pertumbuhan PDB per tenaga yang dipekerjakan	2004–05	Total	5,4%
Rasio lapangan kerja terhadap populasi (usia 15-24)	2007	Total	41,4%
	2007	Pria	50,0%
	2007	Wanita	32,7%
Rasio lapangan kerja terhadap populasi (usia 15+)	2007	Total	61,5%
	2007	Pria	79,2%
	2007	Wanita	44,1%
Proporsi penduduk bekerja dengan penghasilan di bawah USD 1 (PPP) per hari	2002	Total	10,3%
Proporsi penduduk yang bekerja sendiri dan pekerja keluarga tidak dibayar dibandingkan total lapangan kerja	2007	total	63,1%
	2007	pria	60,3%
	2007	wanita	68,0%

Sumber: ILO, KILM edisi kelima

2.5 Perekonomian yang ramah lingkungan demi pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja

Dibutuhkan efisiensi energi yang lebih besar

Untuk jangka panjang, keberlanjutan jalur pembangunan Indonesia akan tergantung pada kemampuan Indonesia melindungi keanekaragaman lingkungan hidupnya yang berharga dan secara efektif mengatasi tantangan perubahan iklim. Terutama, dengan memperbaiki efisiensi pemakaian energi, atau dengan menghijaukan perekonomian, Indonesia akan lebih mampu memastikan diri berjalan di jalur pembangunan berkelanjutan.⁴⁴ Meskipun diperoleh kemajuan dalam efisiensi penggunaan energi di Indonesia, masih ada ruang yang cukup besar bagi perbaikan lebih lanjut (Gambar 2.6). Apabila Indonesia sanggup meningkatkan efisiensi penggunaan energi hingga mencapai tingkat yang sama dengan Thailand, maka output perekonomiannya dapat menjadi 12,9 persen lebih besar dengan jumlah pemakaian energi yang sama. Sebaliknya, diperkirakan bahwa tidak adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim akan mengikis PDB sekitar 6 persen setiap tahunnya hingga akhir abad ini.⁴⁵ Peningkatan efisiensi penggunaan energi juga menghemat sumber daya dan mengurangi kerentanan Indonesia terhadap kenaikan tiba-tiba harga komoditas.

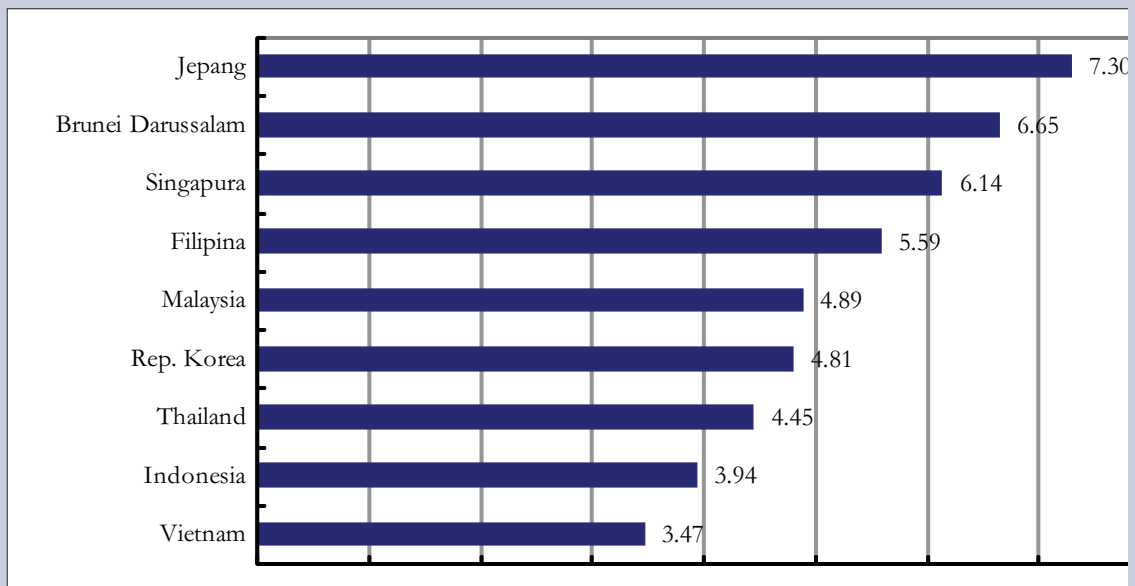
Penciptaan pekerjaan berwawasan lingkungan membutuhkan dialog sosial

Transisi ke perekonomian yang lebih berwawasan lingkungan juga dapat memberikan kesempatan untuk menciptakan “pekerjaan-pekerjaan berwawasan lingkungan.” Ini juga akan memerlukan peningkatan keterampilan dan penggunaan teknologi baru serta dialog dan aksi tripartit untuk melakukan transisi.

44 Efisiensi pemakaian energi diukur dengan PDB per unit pemakaian energi (konstan 2005 PPP \$ per kg ekuivalen minyak). Perhatikan bahwa perbedaan dalam komposisi industrial juga mempengaruhi efisiensi pemakaian energi. Sumber: Bank Dunia, Indikator Pembangunan Dunia.

45 ADB: *Perhitungan Dampak Ekonomi Perubahan Iklim di Asia Tenggara: Kajian Regional* (Manila, 2009).

Gambar 2.7
Efisiensi penggunaan energi



Sumber: Bank Dunia

Lampiran I Pembagian lapangan kerja dalam perekonomian formal dan informal menurut BPS

Status pekerjaan	Pekerjaan utama									
	Tenaga profesional, teknis dan pekerjaan terkait lainnya	Tenaga administrasi dan manajerial	Juru tulis dan kerja terkait lainnya	Tenaga penjualan	Tenaga di bidang jasa	Tenaga di industri pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, dan pemburu	Tenaga produksi dan pekerjaan terkait lainnya	Tenaga transportasi & operator peralatan	Buruh	Lainnya
Bekerja sendiri tanpa karyawan	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Bekerja sendiri, dibantu pegawai sementara/tidak dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Pengusaha	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Karyawan	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Karyawan lepas di pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Karyawan lepas bukan di pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja tidak dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Sumber: BPS Catatan: F berarti formal dan INF berarti informal										

Lampiran II. Lampiran Statistik

Table II.1.
Indikator Pasar Kerja -1990, 1995, 2000, 2004-2008

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2008
Populasi ('000s)								
Laki-laki	177.385	191.501	205.280	216.443	219.210	221.954	224.670	227.345
Perempuan	88.886	95.910	102.675	108.153	109.513	110.863	112.200	113.518
	88.499	95.592	102.605	108.290	109.697	111.091	112.470	113.827
Populasi usia kerja (15+)								
Laki-laki	113.540.758	128.801.764	141.170.805	153.948.922	158.491.396	160.811.498	164.118.323	166.641.050
Perempuan	55.699.876	63.283.453	69.837.799	76.639.849	79.738.436	80.441.969	82.079.391	82.841.198
	57.840.882	65.518.311	71.333.006	77.309.073	78.752.960	80.369.529	82.038.932	83.799.852
Non angkatan kerja								
Laki-laki	38.189.135	44.575.774	43.366.311	49.975.535	52.633.743	54.422.563	54.176.964	54.693.785
Perempuan	9.583.392	9.781.213	10.104.712	10.712.685	12.006.917	12.692.078	13.359.504	13.696.861
	28.605.743	34.794.561	33.261.599	39.262.850	40.626.826	41.730.485	40.817.460	40.996.924
Angkatan kerja								
Laki-laki	75.351.623	84.225.990	97.804.494	103.973.387	105.857.653	106.388.935	109.941.359	111.947.265
Perempuan	46.116.484	53.502.240	59.733.087	65.927.164	67.731.519	67.749.891	68.719.887	69.144.337
	29.235.139	30.723.750	38.071.407	38.046.223	38.126.134	38.639.044	41.221.472	42.802.928
Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)								
Laki-laki	66,4	65,4	69,3	67,5	66,8	66,2	67,0	67,2
Perempuan	82,8	84,5	85,5	86,0	84,9	84,2	83,7	83,5
	50,5	46,9	53,4	49,2	48,4	48,1	50,2	51,1

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2008
Ketenagakerjaan	73.437.376	78.318.036	89.837.730	93.722.036	93.958.387	95.456.935	99.930.217	102.552.750
Laki-laki	44.984.297	50.602.267	55.439.063	60.581.511	61.439.086	61.977.289	63.147.938	63.899.278
Perempuan	28.453.079	27.715.769	34.398.667	33.140.525	32.519.301	33.479.646	36.782.279	38.653.472
Rasio tenaga kerja-penduduk (persen)	64,7	60,8	63,6	60,9	59,3	59,4	60,9	61,5
Laki-laki	80,8	80,0	79,4	79,0	77,1	77,0	76,9	77,1
Women	49,2	42,3	48,2	42,9	41,3	41,7	44,8	46,1
Pengangguran	1.914.247	5.907.954	7.966.764	10.251.351	11.899.266	10.932.000	10.011.142	9.394.515
Laki-laki	1.132.187	2.899.973	4.294.024	5.345.653	6.292.433	5.772.602	5.571.949	5.245.059
Perempuan	782.060	3.007.981	3.672.740	4.905.698	5.606.833	5.159.398	4.439.193	4.149.456
Tingkat pengangguran (persen)	2,5	7,0	8,1	9,9	11,2	10,3	9,1	8,4
Laki-laki	2,5	5,4	7,2	8,1	9,3	8,5	8,1	7,6
Perempuan	2,7	9,8	9,6	12,9	14,7	13,4	10,8	9,7
Sumber: Population: UN, World Population Prospects 2008 Revision Database; For all other indicators: BPS								

Tabel II.2.
Indikator Pasar Kerja Muda -1990, 1995, 2000, 2004-2008

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2008
Populasi usia kerja (15-24)	34.083.155	37.429.551	38.268.568	39.260.775	42.282.753	42.152.876	43.061.390	42.439.529
Laki-laki	16.775.258	18.309.565	18.806.152	19.579.338	21.094.391	21.500.254	21.960.724	21.511.842
Perempuan	17.307.897	19.119.986	19.462.416	19.681.437	21.188.362	20.652.622	21.100.666	20.927.687
Di luar angkatan kerja (15-24)	16.705.890	17.279.702	17.297.885	18.024.335	19.969.234	19.872.306	20.548.852	20.855.631
Laki-laki	6.539.097	6.311.542	6.802.610	7.009.188	7.982.447	8.233.472	8.164.244	8.591.818
Perempuan	10.166.793	10.968.160	10.495.275	11.015.147	11.986.787	11.638.834	12.384.608	12.263.813
Angkatan kerja (15-24)	17.377.265	20.149.849	20.970.683	21.236.440	22.313.519	22.280.570	22.512.538	21.583.898
Laki-laki	10.236.161	11.998.023	12.003.542	12.570.150	13.111.944	13.266.782	13.796.480	12.920.024
Perempuan	7.141.104	8.151.826	8.967.141	8.666.290	9.201.575	9.013.788	8.716.058	8.663.874
Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)	51,0	53,8	54,8	54,1	52,8	52,9	52,3	50,9
Laki-laki	61,0	65,5	63,8	64,2	62,2	61,7	62,8	60,1
Perempuan	41,3	42,6	46,1	44,0	43,4	43,6	41,3	41,4
Bekerja (15-24)	15.995.104	16.120.343	15.886.404	14.959.395	14.853.883	15.464.354	16.852.502	16.552.881
Laki-laki	9.437.955	9.995.182	9.186.013	9.192.238	9.166.087	9.578.277	10.518.143	10.100.765
Perempuan	6.557.149	6.125.161	6.700.391	5.767.157	5.687.796	5.886.077	6.334.359	6.452.116

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2008
Rasio tenaga kerja-penduduk (persen) (15-24)	46,9	43,1	41,5	38,1	35,1	36,7	39,1	39,0
Laki-laki	56,3	54,6	48,8	46,9	43,5	44,5	47,9	47,0
Perempuan	37,9	32,0	34,4	29,3	26,8	28,5	30,0	30,8
Pengangguran (15-24)	1.382.161	4.029.506	5.084.279	6.277.045	7.459.636	6.816.216	5.660.036	5.031.017
Laki-laki	798.206	2.002.841	2.817.529	3.377.912	3.945.857	3.688.505	3.278.337	2.819.259
Perempuan	583.955	2.026.665	2.266.750	2.899.133	3.513.779	3.127.711	2.381.699	2.211.758
Tingkat pengangguran (15-24, persen)	8,0	20,0	24,2	29,6	33,4	30,6	25,1	23,3
Laki-laki	7,8	16,7	23,5	26,9	30,1	27,8	23,8	21,8
Perempuan	8,2	24,9	25,3	33,5	38,2	34,7	27,3	25,5
Sumber: BPS								

Tabel II.3.
Status ketenagakerjaan – 1990, 1995, 2000, 2004–2008

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2008
Total								
Pekerja mandiri	14,810,823	19,892,221	19,501,330	18,309,288	17,296,006	19,504,632	20,324,527	20,921,567
Pengusaha, dengan pegawai sementara/ tidak dibayar	17,884,242	15,473,358	20,720,366	21,512,405	20,987,165	19,946,732	21,024,297	21,772,994
Pengusaha, dengan pegawai tetap	584,992	1,250,124	2,032,527	2,965,893	2,849,076	2,850,448	2,883,832	3,015,326
Pegawai	20,832,755	28,215,271	29,498,039	25,459,554	26,027,953	26,821,889	28,042,390	28,183,773
Pekerja di sektor pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	4,449,921	5,534,842	5,541,158	5,917,315	5,991,493
Pekerja di sektor non-pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	3,732,838	4,325,365	4,618,280	4,458,857	5,292,262
Pekerja tanpa bayaran	19,323,358	13,487,062	18,085,468	17,292,137	16,937,980	16,173,796	17,278,999	17,375,335
Total	73,436,170	78,318,036	89,837,730	93,722,036	93,958,387	95,456,935	99,930,217	102,552,750
Laki-laki								
Pekerja mandiri	9,965,441	13,537,146	13,222,375	12,844,876	12,358,294	13,551,397	13,557,406	13,536,283
Pengusaha, dengan pegawai sementara/ tidak dibayar	14,127,834	11,670,075	16,128,013	16,896,284	16,897,505	15,669,243	15,890,034	16,253,889
Pengusaha, dengan pegawai tetap	489,313	1,057,996	1,608,168	2,602,297	2,460,974	2,466,231	2,374,922	2,486,057
Pegawai	14,343,900	19,992,511	19,788,206	17,629,206	17,706,648	17,934,753	18,911,566	18,484,669
Pekerja di sektor pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	2,841,687	3,642,291	3,724,423	3,767,045	3,827,136
Pekerja di sektor non-pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	3,228,822	3,635,460	3,868,884	3,713,920	4,348,290
Pekerja tanpa bayaran	6,057,151	4,344,539	4,692,301	4,538,339	4,737,914	4,762,358	4,933,045	4,962,954
Total	44,983,639	50,602,267	55,439,063	60,581,511	61,439,086	61,977,289	63,147,938	63,899,278
Perempuan								
Pekerja mandiri	4,845,382	6,355,075	6,278,955	5,464,412	4,937,712	5,953,235	6,767,121	7,385,284
Pengusaha, dengan pegawai sementara/ tidak dibayar	3,756,408	3,803,283	4,592,353	4,616,121	4,089,660	4,277,489	5,134,263	5,519,105

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2008
Pengusaha, dengan pegawai tetap	95,679	192,128	424,359	363,596	388,102	384,217	508,910	529,269
Pegawai	6,488,855	8,222,760	9,709,833	7,830,348	8,321,305	8,887,136	9,130,824	9,699,104
Pekerja di sektor pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	1,608,234	1,892,551	1,816,735	2,150,270	2,164,357
Pekerja di sektor non-pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	504,016	689,905	749,396	744,937	943,972
Pekerja tanpa bayaran	13,266,207	9,142,523	13,393,167	12,753,798	12,200,066	11,411,438	12,345,954	12,412,381
Total	28,452,531	27,715,769	34,398,667	33,140,525	32,519,301	33,479,646	36,782,279	38,653,472
Percentage shares								
Total								
Pekerja mandiri	20.2	25.4	21.7	19.5	18.4	20.4	20.3	20.4
Pengusaha, dengan pegawai sementara/ tidak dibayar	24.4	19.8	23.1	23.0	22.3	20.9	21.0	21.2
Pengusaha, dengan pegawai tetap	0.8	1.6	2.3	3.2	3.0	3.0	2.9	2.9
Pegawai	28.4	36.0	32.8	27.2	27.7	28.1	28.1	27.5
Pekerja di sektor pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	4.7	5.9	5.8	5.9	5.8
Pekerja di sektor non-pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	4.0	4.6	4.8	4.5	5.2
Pekerja tanpa bayaran	26.3	17.2	20.1	18.5	18.0	16.9	17.3	16.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Laki-laki								
Pekerja mandiri	22.2	26.8	23.9	21.2	20.1	21.9	21.5	21.2
Pengusaha, dengan pegawai sementara/ tidak dibayar	31.4	23.1	29.1	27.9	27.5	25.3	25.2	25.4
Pengusaha, dengan pegawai tetap	1.1	2.1	2.9	4.3	4.0	4.0	3.8	3.9
Pegawai	31.9	39.5	35.7	29.1	28.8	28.9	29.9	28.9
Pekerja di sektor pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	4.7	5.9	6.0	6.0	6.0
Pekerja di sektor non-pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	5.3	5.9	6.2	5.9	6.8
Pekerja tanpa bayaran	13.5	8.6	8.5	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2008
Perempuan								
Pekerja mandiri	17.0	22.9	18.3	16.5	15.2	17.8	18.4	19.1
Pengusaha, dengan pegawai sementara/ tidak dibayar	13.2	13.7	13.4	13.9	12.6	12.8	14.0	14.3
Pengusaha, dengan pegawai tetap	0.3	0.7	1.2	1.1	1.2	1.1	1.4	1.4
Pegawai	22.8	29.7	28.2	23.6	25.6	26.5	24.8	25.1
Pekerja di sektor pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	4.9	5.8	5.4	5.8	5.6
Pekerja di sektor non-pertanian	n.a.	n.a.	n.a.	1.5	2.1	2.2	2.0	2.4
Pekerja tanpa bayaran	46.6	33.0	38.9	38.5	37.5	34.1	33.6	32.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Sumber: BPS</i>								

Tabel II. 4
Pekerjaan berdasarkan sektor - 1990, 1995, 2000, 2004-2008

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2008
Total								
Pertanian	40,559,333	34,009,912	40,680,229	40,608,019	41,309,776	40,136,242	41,206,474	41,331,706
Pertambangan	512,270	633,224	451,931	1,034,716	904,194	923,591	994,614	1,070,540
Manufaktur	7,468,270	9,901,478	11,641,756	11,070,498	11,952,985	11,890,170	12,368,729	12,549,376
Listrik, gas & air	134,716	215,694	70,629	228,297	194,642	228,018	174,884	201,114
Konstruksi	2,046,415	3,746,553	3,497,232	4,540,102	4,565,454	4,697,354	5,252,581	5,438,965
Perdagangan, restoran & hotel	10,837,931	13,684,652	18,489,005	19,119,156	17,909,147	19,215,660	20,554,650	21,221,744
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	2,302,014	3,447,218	4,553,855	5,480,527	5,652,841	5,663,956	5,958,811	6,179,503
Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	477,765	658,497	882,600	1,125,056	1,141,852	1,346,044	1,399,490	1,459,985
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	9,098,662	12,020,808	9,570,493	10,515,665	10,327,496	11,355,900	12,019,984	13,099,817
Total	73,437,376	78,318,036	89,837,730	93,722,036	93,958,387	95,456,935	99,930,217	102,552,750
Laki-laki								
Pertanian	24,637,241	21,931,497	24,603,835	25,819,512	26,891,514	26,369,336	25,983,403	25,913,925
Pertambangan	429,922	532,821	370,253	869,021	765,326	817,716	874,271	938,427
Manufaktur	4,124,470	5,713,677	6,722,850	6,660,143	7,033,757	7,005,482	7,119,262	7,128,631
Listrik, gas & air	123,870	188,928	65,020	207,955	179,174	202,721	153,669	183,913
Konstruksi	1,987,777	3,646,520	3,356,604	4,428,668	4,465,861	4,574,450	5,119,560	5,311,318
Perdagangan, restoran & hotel	5,190,377	6,973,033	9,684,593	10,230,959	9,711,815	10,330,764	10,372,192	10,514,476
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	2,249,749	3,373,662	4,364,293	5,285,517	5,480,334	5,373,961	5,586,530	5,465,585
Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	353,089	475,122	627,229	843,378	835,396	953,079	995,458	1,028,203

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2008
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	5,887,802	7,767,007	5,644,386	6,236,358	6,075,909	6,349,780	6,943,593	7,414,800
Total	44,984,297	50,602,267	55,439,063	60,581,511	61,439,086	61,977,289	63,147,938	63,899,278
Perempuan								
Pertanian	15,922,092	12,078,415	16,076,394	14,788,507	14,418,262	13,766,906	15,223,071	15,417,781
Pertambangan	82,348	100,403	81,678	165,695	138,868	105,875	120,343	132,113
Manufaktur	3,343,800	4,187,801	4,918,906	4,410,355	4,919,228	4,884,688	5,249,467	5,420,745
Listrik, gas & air	10,846	26,766	5,609	20,342	15,468	25,297	21,215	17,201
Konstruksi	58,638	100,033	140,628	111,434	99,593	122,904	133,021	127,647
Perdagangan, restoran & hotel	5,647,554	6,711,619	8,804,412	8,888,197	8,197,332	8,884,896	10,182,458	10,707,268
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	52,265	73,556	189,562	195,010	172,507	289,995	372,281	713,918
Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	124,676	183,375	255,371	281,678	306,456	392,965	404,032	431,782
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	3,210,860	4,253,801	3,926,107	4,279,307	4,251,587	5,006,120	5,076,391	5,685,017
Total	28,453,079	27,715,769	34,398,667	33,140,525	32,519,301	33,479,646	36,782,279	38,653,472
Percentage shares								
Total								
Pertanian	55.2	43.4	45.3	43.3	44.0	42.0	41.2	40.3
Pertambangan	0.7	0.8	0.5	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
Manufaktur	10.2	12.6	13.0	11.8	12.7	12.5	12.4	12.2
Listrik, gas & air	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Konstruksi	2.8	4.8	3.9	4.8	4.9	4.9	5.3	5.3
Perdagangan, restoran & hotel	14.8	17.5	20.6	20.4	19.1	20.1	20.6	20.7
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	3.1	4.4	5.1	5.8	6.0	5.9	6.0	6.0
Keuangan, asuransi, properti dan layanan usaha	0.7	0.8	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	12.4	15.3	10.7	11.2	11.0	11.9	12.0	12.8
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

	1990	1995	2000	2004	2005	2006	2007	2008
Laki-laki								
Pertanian	54.8	43.3	44.4	42.6	43.8	42.5	41.1	40.6
Pertambangan	1.0	1.1	0.7	1.4	1.2	1.3	1.4	1.5
Manufaktur	9.2	11.3	12.1	11.0	11.4	11.3	11.3	11.2
Listrik, gas & air	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
Konstruksi	4.4	7.2	6.1	7.3	7.3	7.4	8.1	8.3
Perdagangan, restoran & hotel	11.5	13.8	17.5	16.9	15.8	16.7	16.4	16.5
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	5.0	6.7	7.9	8.7	8.9	8.7	8.8	8.6
Kepangan, asuransi, properti dan layanan usaha	0.8	0.9	1.1	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	13.1	15.3	10.2	10.3	9.9	10.2	11.0	11.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Perempuan								
Pertanian	56.0	43.6	46.7	44.6	44.3	41.1	41.4	39.9
Pertambangan	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
Manufaktur	11.8	15.1	14.3	13.3	15.1	14.6	14.3	14.0
Listrik, gas & air	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
Konstruksi	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
Perdagangan, restoran & hotel	19.8	24.2	25.6	26.8	25.2	26.5	27.7	27.7
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.9	1.0	1.8
Kepangan, asuransi, properti dan layanan usaha	0.4	0.7	0.7	0.8	0.9	1.2	1.1	1.1
Komunitas, sosial dan layanan pribadi	11.3	15.3	11.4	12.9	13.1	15.0	13.8	14.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Sumber: BPS								

Tabel II.5
Indikator-indikator Latar Belakang

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Produk Domestik Bruto (tingkat pertumbuhan tahunan) <i>Source: ADB, Asia Economic Monitor 2007; For 2008: IMF, World Economic Outlook Database, April 2009</i>	4,9	3,6	4,5	4,8	5,0	5,7	5,5	6,3	6,1
Produk Domestik Bruto per kapita (constant 2000 US\$) <i>Source: World Bank, World Development Indicators</i>	800	818	844	872	904	943	983	1.033	1.083
Produk Domestik Bruto, purchasing power parity (PPP) (constant 2005 US\$) <i>Source: World Bank, World Development Indicators</i>	2.714	2.776	2.862	2.959	3.066	3.197	3.335	3.504	3.674
Jumlah kaum miskin (jutaan) Persentase kaum miskin <i>Sumber: BPS</i>	38,7 19,4	37,9 18,4	38,4 18,2	37,3 17,4	36,1 16,7	35,1 16,0	39,3 17,8	37,2 16,6	35,0 15,4